



# **RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO 2020-2024**



**Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo**  
Jl. H. Agus Salim No. 10 Purworejo 54111; telp : (0275) 321082  
Web : [kemenag.purworejo.go.id](http://kemenag.purworejo.go.id); e-mail : [kabpurworejo@kemenag.go.id](mailto:kabpurworejo@kemenag.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo (Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo) disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024, hasil evaluasi Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tahun 2015-2019, dan aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024 ini memuat tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, dan strategi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo ini telah mengacu pada 5 (lima) tujuan pencapaian misi Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo, yang mana kelima tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam 41 (empat puluh satu) Sasaran Kegiatan berdasar pada Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024 acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan Agama tahun 2024.

Purworejo, 28 September 2020

Plt. Kepala



Drs. H. Farid Solihin, MM.Pd



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 217.A TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);  
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 680 Tanggal 30 Juni 2020);
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PURWOREJO TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk :

1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 28 September 2020

Plt. KEPALA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PURWOREJO



Farid Solihin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR		iii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR GAMBAR		vi
DAFTAR TABEL		vii
DAFTAR SINGKATAN		viii
BAB I – PENDAHULUAN		1
1. 1	Kondisi Umum	1
1. 1. 1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	3
1. 1. 2	Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	4
1. 1. 2. 1	Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan	5
1. 1. 3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	10
1. 1. 3. 1	Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar	10
1. 1. 3. 2	Penyuluh Agama yang Kompeten	11
1. 1. 3. 3	Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar	15
1. 1. 3. 4	Penghulu yang Kompeten	19
1. 1. 3. 5	Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kab. Purworejo	20
1. 1. 4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	25
1. 1. 5	Peningkatan Mutu Pendidikan Pendidikan Agama dan Keagamaan	28
1. 1. 6	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Melalui Program Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM	30
1. 2	Potensi dan Permasalahan	35
1. 2. 1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	35
1. 2. 2	Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	36
1. 2. 3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	37
1. 2. 4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	38
1. 2. 5	Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	39
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN		41
2. 1	Tujuan	41
2. 2	Sasaran Kegiatan	41
BAB III – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		79
3. 1	Target Kinerja	79
3. 2	Kerangka Pendanaan	95
PENUTUP		99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Dokumentasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	7
Gambar 2	Dokumentasi Gerak Jalan Kerukunan Umat Beragama	8
Gambar 3	Dokumentasi Dialog Kerukunan Umat Beragama	9
Gambar 4	Dokumentasi Donor darah	9
Gambar 5	Dokumentasi Pelaksanaan Manasik sepanjang masa	22
Gambar 6	Dokumentasi Sosialisasi Pembuatan paspor kolektif	23
Gambar 7	Dokumentasi Dialog interaktif di Radio Irama FM	24

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Potret Persentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019	4
Tabel 2	Potret Persentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019	4
Tabel 3	Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar	11
Tabel 4	Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi	12
Tabel 5	Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk	13
Tabel 6	Prestasi Penyuluh Agama Islam Fungsional	14
Tabel 7	Prestasi Penyuluh Agama Islam Non PNS	14
Tabel 8	Prestasi KUA	17
Tabel 9	Data Tanah dan Bangunan KUA	17
Tabel 10	Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi	20
Tabel 11	Data Indeks Kepuasan Layanan Haji Embarkasi SOC	20
Tabel 12	Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kabupaten Purworejo	25
Tabel 13	Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	26
Tabel 14	Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP	27
Tabel 15	Data Nilai Rata-Rata Hasil UN	28
Tabel 16	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019	29
Tabel 17	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019 Pada Madrasah	29
Tabel 18	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Katolik Tahun 2015 s.d. 2019	29
Tabel 19	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS1)	41
Tabel 20	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS2)	42
Tabel 21	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS3)	44
Tabel 22	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS4)	45
Tabel 23	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS5)	47

Tabel 24	Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS6)	47
Tabel 25	Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS7)	49
Tabel 26	Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS8)	50
Tabel 27	Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 9)	51
Tabel 28	Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS10	52
Tabel 29	Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 11)	52
Tabel 30	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	57
Tabel 31	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo sampai dengan thn 2024	81
Tabel 32	Indikasi Kebutuhan Pendanaan 9 (Sembilan) Program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo 2020-2024	95
Tabel 33	Indikasi Kebutuhan Pendanaan 4 (Empat) Program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo 2020-2024	97



## DAFTAR SINGKATAN

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
AYIC	ASEAN Youth Interfaith Camp
Balitbang	Badan Penelitian dan pengembangan
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
DLAB	Dialog Lintas Agama dan Budaya
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	Focus Group Discussion
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IIID	Indonesia-India Interfaith Dialogue
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRC	Inter Religion Council
Kanwil	Kantor Wilayah
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KDA 2019	Kementerian Agama dalam Angka 2019
Kepmen	Keputusan Menteri
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiah

KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MIKTA	Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MYERS	Madrasah Young Researchers Super Camp
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NR	Nikah Rujuk
NRG	Nomor Registrasi Guru
OSN	Olimpiade Sains Nasional
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PIP	Program Indonesia Pintar
PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
Renstra	Rencana Strategis
SAPA	Sarapan Bersama Penyuluh Agama
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen

SK	Surat Keputusan
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SOC	Embarkasi Solo
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TK	Taman Kanak-Kanak
UIN	Universitas Islam Negeri
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
Wamenlu	Wakil Menteri Luar Negeri
ZI	Zona Integritas

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo (Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo ) periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kanwil Kementerian Agama, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dalam lima tahun terakhir dan berbagai *Focuss Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada periode Rencana Strategis sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Kabupaten Purworejo periode 2020-2024.

### **1.1 Kondisi Umum**

Kondisi umum dari Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Purworejo yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode

Rencana Strategis Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas **empat komponen**, yaitu: **taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera**.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo telah menyusun 7 (tujuh) misi sebagai pendukung, yaitu :

1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) tujuan sesuai dengan masing-masing sasaran. Berikut indikator realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyelarasan dan mempertajam tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kab./Kabupaten, berdasarkan kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, delapan tujuan diatas kemudian disederhanakan ke dalam 5 (lima) sasaran, sasaran tersebut adalah :

1. meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
2. meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
3. meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
4. meningkatnya akses layanan pendidikan;
5. meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Adapun capaian dan sasaran selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut.

#### **1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama**

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator :1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku; dan 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Cara pengukuran dari dua indikator ini didapatkan melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayah binaan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2019, dilihat dari peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama prosentase capaian kinerja sudah sangat baik (di atas 90 %), namun prosentase nilai keaktifan umat beragama pada rumah ibadah masih

rendah, yakni masih di angka 48,00%. Sementara presentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan berkisar 51,00%. Presentase yang masih berada pada posisi tengah ini erat kaitannya dengan kurangnya tenaga penyuluh yang dimiliki, sehingga masih banyak masyarakat dan tempat ibadah yang belum tersentuh berkaitan dengan pengukuran indikator dimaksud. Dengan demikian masih menyisakan pekerjaan besar untuk periode berikutnya.

Variasi presentase keaktifan umat dan peran sosial keagamaan rumah ibadah pada masing-masing kelompok pemeluk agama sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Potret Presentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019**

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Penduduk	763.473	8121	11404	101	668	9	783.776
Jumlah Yang Aktif pada Rumah ibadah	366.467	3898	5474	48	321	4	376212
Presentase Keaktifan	48 %	48 %	48 %	48 %	48 %	48 %	48 %

*Laporan Kinerja 2019*

**Tabel 2**  
**Potret Presentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019**

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Rumah Ibadah	3828	63	25	2	9	1	3928
Rumah Ibadah Yang Melakukan Kegiatan Sosial Keagamaan	1952	32	12	1	5	1	2003
Presentase Keaktifan Kegiatan Sosial Keagamaan	51 %	51 %	51 %	51 %	51 %	51 %	51 %

*Laporan Kinerja 2019*

### **1.1.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama**

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di Kabupaten Purworejo serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Purworejo yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, *knowledge sharing* aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama.

Karena tidak ditemukan konflik umat beragama yang berarti, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Purworejo kehidupan umat beragamanya sangat harmonis saling menghargai diantara pemeluk agama serta kerukunan antar umat beragama sangat terjaga.

#### **1.1.2.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan**

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.



Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama khususnya di Kabupaten Purworejo adalah keharusan dikarenakan masyarakatnya yang sangat plural dan multikultural. Terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama.

Di Kabupaten Purworejo, isu multikultural telah dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalisir perbedaan yang menimbulkan konflik yang memecah kehidupan bermasyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Purworejo hadir dengan berbagai agenda dalam meningkatkan moderasi beragama dengan kegiatan-kegiatan yang diterima oleh masyarakat. Pada tahun 2015 sampai 2019 kegiatan yang dilakukan adalah:

#### *1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama*

Kegiatan pembinaan diikuti oleh perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ormas keagamaan. Jumlah peserta sebanyak 30 orang di setiap kegiatan. Pembinaan dilaksanakan setahun 3 kali sepanjang 2016-2019. Adapun narasumber diantaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, Camat, Polres, Kodim, FKUB, serta Kesbangpol.



**Gambar 1**

### **Dokumentasi Pembinaan Kerukunan Keagamaan**

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah diketahuinya kondisi riil kerukunan umat beragama, terjadinya tukar informasi kondisi kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Purworejo.

#### **2. Jalan Sehat Keluarga Kerukunan Umat Beragama**

Untuk menciptakan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat melalui tri kerukunan Umat Beragama yakni : Kerukunan Intern Umat Beragama; Kerukunan Antar Umat Beragama serta Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah. Salah satu cara menciptakan kondisi kerukunan yaitu melalui kegiatan jalan sehat keluarga kerukunan. Gerak jalan diikuti oleh tokoh umat beragama berikut perwakilan dari umat beragama beserta keluarganya, lembaga keagamaan, perwakilan siswa dan guru madrasah, serta ASN di lingkungan Kemenag Kabupaten Purworejo dengan total jumlah peserta sekitar 700 orang. Kegiatan ini terlaksana pada bulan Desember 2019.



**Gambar 2**

### **Dokumentasi Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama**

#### **3. Dialog Kerukunan Umat Beragama**

Kegiatan Dialog diikuti oleh perwakilan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jumlah peserta sebanyak 96 orang. Adapun narasumber dari Kesbangpol Jawa Tengah, Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, dan Kapolres Purworejo. Kegiatan sudah terlaksana pada bulan Agustus 2018.



**Gambar 3**

### **Dialog Kerukunan Umat Beragama**

#### **4. Donor Darah Lintas Agama**

Kegiatan Donor Darah diikuti oleh para tokoh agama dan perwakilan semua agama dan terselenggara pada Januari 2020.



**Gambar 4**

### **Donor Darah Lintas Agama**

### **1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan**

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Sebagai institusi vertikal Kementerian Agama Kabupaten Purworejo mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan institusi di atasnya. Pelaksanaan peningkatan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di Kabupaten -Purworejo diukur dengan indikator berikut, yaitu: 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar; 2) Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi; 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar; 4) Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi; dan 5) Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri.

#### **1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar**

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/rehabilitasi/ pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir masjid/marbot

agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib. Sampai dengan tahun 2019, telah tersedia 3828 masjid/mushola, 63. gereja Kristen/rumah kebaktian, 25 gereja Katolik/paroki/stasi/kapel, 2 pura, 9 rumah ibadah Buddha (vihara, cetiya, kelenteng, pusdiklat), serta 1 kelenteng/Konghucu. Sementara jumlah rumah ibadah yang telah memenuhi standar sebagai hasil dari capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Ibadah	1950	1970	1990	1995	2003

*Sumber : Laporan Capaian Kinerja*

Indikator rumah ibadah yang memenuhi standar adalah: rumah ibadah yang memenuhi kenyamanan umat dalam beribadah meliputi keamanan, kebersihan, kesehatan dan kelengkapan prasarana dan sarana peribadatan. Sampai dengan akhir periode Renstra ini tempat ibadah yang memenuhi standar berjumlah 2003 atau 51.00 % dari jumlah tempat ibadah yang ada di Kabupaten Purworejo masih perlu banyak perbaikan rumah ibadah yang harus dilakukan di Kabupaten Purworejo hingga tempat ibadah memenuhi standar pelayanan.

#### **1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten**

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota ... telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota ... berasal dari

sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui program mandatory SAPA penyuluh.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan.

Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Dari sejumlah kriteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten di Kabupaten Purworejo selama 5 tahun terakhir:



**Tabel 4**  
**Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Islam</b>	363	363	164	163	163
<b>Kristen</b>	0	0	5	5	5
<b>Katolik</b>	0	0	6	6	6
<b>Hindu</b>	0	0	0	0	0
<b>Buddha</b>	0	0	0	0	0
<b>Khonghucu</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	363	363	164	163	163

*Sumber : Laporan Capaian Kinerja*

**Tabel 5**  
**Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk**

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
<b>Jumlah Penduduk</b>	763.473	31.412	25.968	0	0	0	820.853
<b>Penyuluh PNS</b>	11	0	0	0	0	0	11
<b>Penyuluh Non PNS</b>	152	5	6	0	0	0	163
<b>Jumlah Penyuluh</b>	163	5	6	0	0	0	174
<b>Rasio per Agama</b>	12:119	1:6282	1:4328	0	0	0	1:4717

*Sumber : KDA Tahun 2019*

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel diatas dimana 1 orang penyuluh agama harus melayani rata- rata sebanyak 12.119 umat beragama, sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

Untuk menanamkan Aqidah dan ajaran agama kepada umat islam di kabupaten purworejo, Kementerian Agama Kabupaten Purworejo bersama dengan para penyuluh



agama islam baik PNS ataupun Non PNS, melaksanakan pembinaan umat beragama melalui majelis taklim yang ada di kabupaten purworejo.

Sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap penyuluh agama adalah diadakanya pemilihan penyuluh teladan yang dapat dijadikan salah satu sarana evaluasi, peningkatan kompetensi kinerja dan pengembangan diri penyuluh agama, baik penyuluh agama PNS maupun penyuluh agama non PNS. Prestasi penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Prestasi Penyuluh Agama Islam Fungsional**

Tahun	PAIF	KUA	Prestasi
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	Farida Munawaraoh, S.Pd.I	Banyuurip	Juara I Kabupaten

Sumber: Bimas Islam

**Tabel 7**  
**Prestasi Penyuluh Agama Islam Non PNS**

Tahun	PA Non PNS	KUA	Prestasi
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	Ratna Ulfatul Fuadiyah	Banyuurip	Juara II Nasional

Sumber: Bimas Islam

Untuk penyuluh agama Islam Non PNS selain sebagai Juara I tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 juga sebagai wakil Provinsi JAWA TENGAH pada seleksi tingkat nasional dan memperoleh prestasi sebagai juara 2 tingkat Nasional.

#### **1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan publik Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti:

- a. Deklarasi Integritas Layanan KUA;
- b. Penguatan Zona Integritas Kepala KUA;
- c. Penguatan Zona Integritas Penghulu;
- d. Penilaian KUA Percontohan/teladan;
- e. Pembinaan SDM Kepenghulan;
- f. Survey pengendalian gratifikasi layanan nikah;
- g. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah;

- h. *Focus Group Discussion (FGD)* dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA;

Dari kegiatan yang dilakukan oleh seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Purworejo memperoleh hasil yang cukup baik, dengan indikator positif :

- a. Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
- b. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di KUA Kecamatan;
- c. Maklumat Layanan dan Kode Etik Pegawai sudah ditandatangani oleh Kepala KUA dan dipasang pada setiap KUA Kecamatan;
- d. Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh Kepala KUA beserta Penghulu dan Staf KUA Kecamatan;
- e. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA;
- f. Administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNBP on-line dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta;
- g. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah;
- h. Hasil survei pengendalian gratifikasi kepada wali nikah/pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di kantor KUA sudah tidak ada pungutan biaya dan untuk biaya nikah diluar kantor KUA sebesar Rp. 600.000,-, calon pengantin/wali nikah setor langsung di Bank serta tiada biaya tambahan di KUA;
- i. Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya;

Sebagai salah satu penghargaan terhadap KUA, maka diselenggarakan pemilihan KUA teladan sebagai sarana evaluasi atas kinerja dari tingkat Kabupaten Purworejo

sampai dengan nasional. Hasil Penilaian KUA Teladan. Purworejo dalam kurun waktu 2015-2019 sudah menunjukkan prestasi yang baik, tetapi pembinaan harus tetap dilakukan agar kinerja KUA senantiasa terpelihara dan meningkat, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia. Hasil dari evaluasi KUA teladan pada Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dapat di lihat dalam tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Data Prestasi KUA**

Tahun	Kepala KUA	KUA	Prestasi
2015	Drs.H. Much. Zainal Fitri	Purworejo 1	Juara I Kabupaten
2016	-	-	-
2017	-	-	-
2018	Nurodin, S.Pd.I	Loano 2	Juara I Kabupaten
2019	Dadan Ridwan, S.Ag	Banyuurip	Juara I Kabupaten

*Sumber : Seksi Bimas Islam*

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kementerian Agama berupaya memenuhi ketersediaan dan standarisasi gedung dan bangunan. Dengan alokasi dana bersumber dari SBSN standarisasi gedung KUA dilaksanakan dengan syarat telah memiliki tanah atas nama pemerintah RI. C.q Kementerian Agama dengan luas minimal 300m<sup>2</sup>. Di Kabupaten Purworejo pembangunan KUA dilaksanakan pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Data Tanah dan Bangunan KUA**

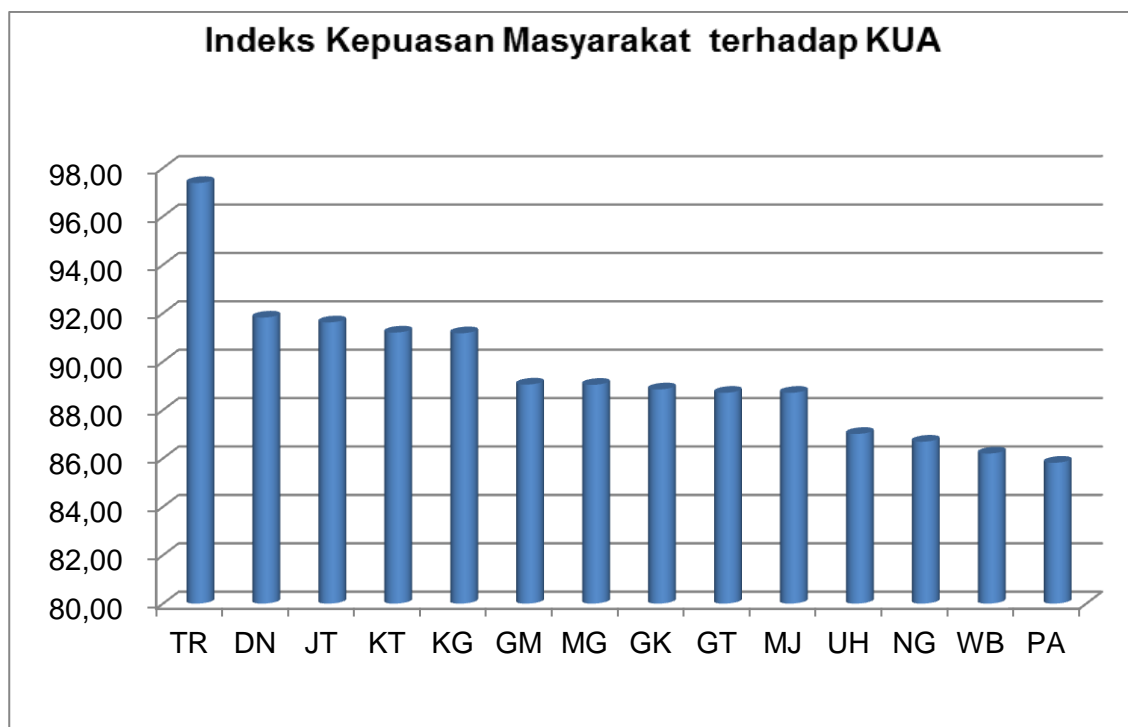
No	KUA	Kepemilikan/Satus Tanah	Bangunan	
			Milik	Perolehan
1	Bagelen	Hak Pakai/Wakaf	Kemenag	APBN / RM
2	Banyuurip	Hak Milik	Kemenag	APBN / RM
3	Bayan	Hak Pakai	Kemenag	APBN / RM
4	Bener	Hak Pakai	Kemenag	APBN / RM
5	Bruno	Hak Milik	Kemenag	APBN / RM
6	Butuh	Hak Pakai	Kemenag	APBN / RM
7	Gebang	Hak Milik	Kemenag	SBSN

8	Grabag 1	Hak Pakai/Wakaf	Kemenag	APBN / RM
9	Grabag2	Hak Milik	Kemenag	APBN / RM
10	Kaligesing	Hak Milik	Kemenag	APBN / RM
11	Kemiri	Hak Pakai	Kemenag	APBN / RM
12	Kutoarjo	Hak Pakai	Kemenag	APBN / RM
13	Loano 1	Hak Pakai	Kemenag	APBN / RM
14	Loano 2	Hak Pakai/Wakaf	Kemenag	APBN / RM
15	Ngombol	Hak Pakai	Kemenag	APBN / RM
16	Pituruh	Hak Pakai	Kemenag	APBN / RM
17	Purwodadi	Hak Pakai	Kemenag	APBN / RM
18	Purworejo 1	Hak Pakai/Wakaf	Kemenag	APBN / RM
19	Purworejo 2	Hak Pakai	Kemenag	APBN / RM

Dari tabel 10 tersebut diketahui bahwa sampai dengan tahun 2019 terdapat 4 KUA berdiri pada tanah sendiri, 4 KUA berdiri pada tanah Wakaf dan 11 KUA berdiri pada tanah Pemerintah Kabupaten Purworejo/Desa. Adapun 19 bangunan gedung KUA merupakan milik Kementerian Agama RI yang dibangun menggunakan dana APBN/RM, Adapun KUA Kecamatan Gebang pada Tahun 2016 Menempati Gedung baru yang dibangun bersumber dari dana SBSN.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan terhadap masyarakat, di 19 KUA telah dilakukan Survey Kepuasan Layanan melalui IKM pada tahun 2019. Dari survey IKM tersebut menunjukkan angka kepuasan layanan sebesar 82,56. Indikator kepuasan layanan tersebut diukur dari 11 dimensi, yaitu : 1) Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, 2) Kejelasan Petugas Pelayanan, 3) Kedisiplinan dan tanggungjawab, 4) Kemampuan Petugas, 5) Kepastian Jadwal dan Kecepatan Pelayanan, 6) Keadilan Mendapatkan Pelayanan, 7) Kesopanan dan Keramahan Petugas, 8) Kewajaran Biaya Pelayanan, 9) Kepastian Biaya Layanan, 10) Kenyamanan Lingkungan dan 11) Keamanan Pelayanan. Hal ini menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap layanan KUA sudah Sangat memuaskan.

**Grafik 1**  
**Survey Kepuasan Layanan KUA**



*Sumber: Survey IKM 2019*

#### **1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten**

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di Seksi pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi di Seksi baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 4 tugas penghulu adalah :

- Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluhan;
- Pengawasan pencatatan NR;

- Pelaksanaan pelayanan NR,
- Penasehatan dan konsultasi NR;
- Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
- Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- Pembinaan keluarga sakinah;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluhan dan pengembangan kepenghuluhan

**Tabel 10**  
**Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi**

Jumlah Penghulu	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Kab. Purworejo	39	39	38	36	36	188

*Sumber : Seksi Bimas Islam*

#### **1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Purworejo**

Jumlah jemaah haji yang berangkat melalui Kabupaten Purworejo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu ditingkatkan.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir indeks kepuasan jemaah haji selama berada di Asrama Haji Donohudan mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Data Indeks Kepuasan Layanan Haji Embarkasi SOC**

TAHUN				
2015	2016	2017	2018	2019
82,26	83,83	84,85	85,23	85,91

*Sumber : Badan Litbang dan Diklat / BPS*

Peningkatan indeks tersebut bukan tanpa usaha yang optimal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dijalankan dan dibiayai pemerintah dilaksanakan mendekati jadwal waktu keberangkatan ibadah haji, sehingga hasil dari kegiatan bimbingan ibadah haji belum maksimal, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai kiat untuk mengatasi permasalahan bimbingan ibadah haji yang belum maksimal, maka digagas kegiatan Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun. Kegiatan ini dilakukan oleh dan untuk jamaah, pembiayaan dilakukan secara swadaya dan peran Kementerian Agama Kabupaten Purworejo sebatas sebagai penyedia narasumber dan pembimbing. Seluruh akomodasi dan lain-lain di biayai sendiri oleh jamaah dengan swadaya. Program ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam sebulan di masing-masing KUA Kecamatan, dengan program ini maka calon jamaah haji bisa mempersiapkan diri lebih dini. Jamaah memperoleh pelatihan dan bimbingan tata cara ibadah haji yang lebih tuntas, baik tata cara beribadah, tata cara hidup, tata cara menjaga kesehatan dan kebugaran serta beradaptasi secepat mungkin dengan iklim dan budaya di Arab Saudi. Bimbingan ini bertempat di lingkungan sekitar tempat tinggal jamaah yaitu di Aula KUA, pendopo kecamatan setempat, gedung IPHI Kecamatan, atau di rumah jamaah sehingga memudahkan jamaah.

Selain bimbingan ibadah haji secara teori dan tatap muka juga diberikan tambahan dengan praktek antara lain praktek mengenakan kain ihrom, serta praktek manasik haji dengan menggunakan alat peraga di masing-masing kecamatan. Hampir semua KUA kecamatan memiliki miniatur Ka'bah untuk mendukung praktek manasik haji dan umrah.





Gambar 5. Pelaksanaan Manasik Haji Sepanjang Tahun



**Gambar 6. Pelaksanaan Sosialisasi Pembuatan Paspor Kolektif**

Selain kegiatan manasik calon jamaah haji tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo juga menyelenggarakan kegiatan sistem pengurusan paspor secara kolektif. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu calon jamaah haji dalam pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Klas II Wonosobo.

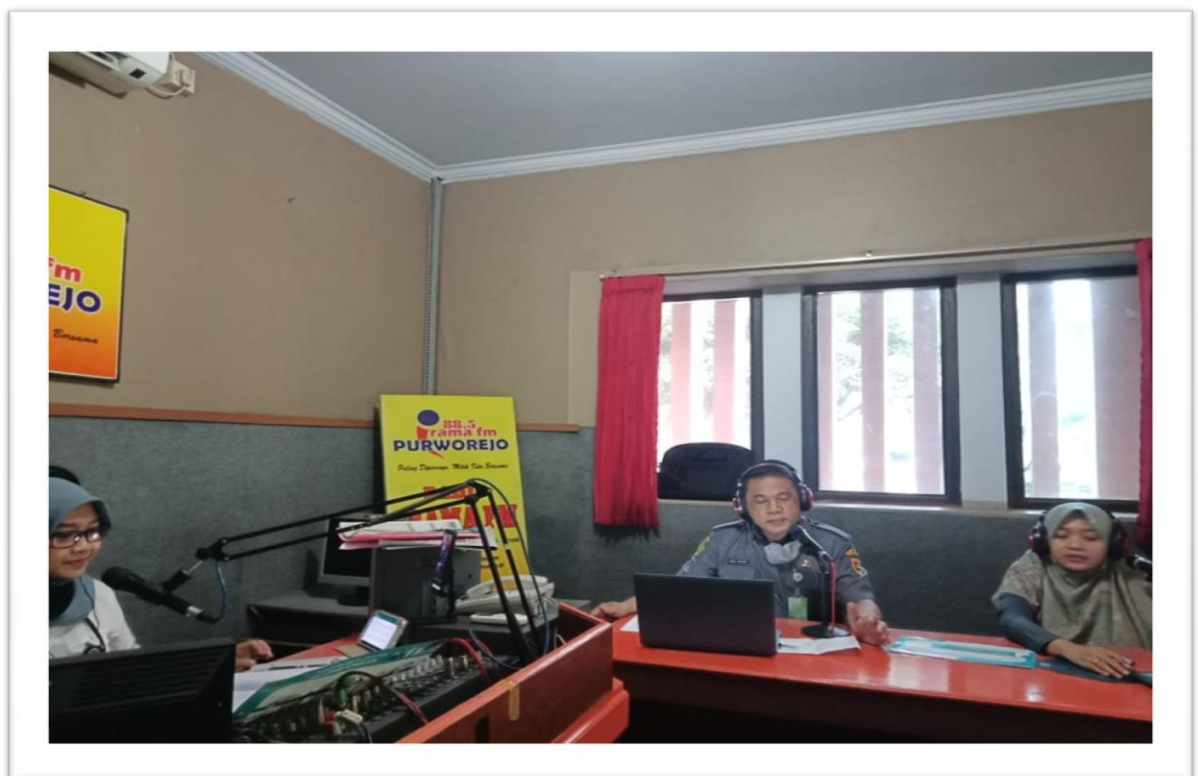
Jamaah mendapatkan Sosialisasi Penerbitan Paspor agar dapat memahami regulasi dan prosedur pembuatan paspor haji. Selanjutnya jamaah diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas pembuatan paspor seperti: Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, dan dokumen pendukung berupa Fotokopi Akte Kelahiran/Buku Nikah/Ijazah dan dipandu pengisian Formulir PERDIM:11 oleh petugas Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Dokumen permohonan paspor jamaah kemudian dilengkapi dengan Rekomendasi Paspor Haji dan dikirim ke Kantor Imigrasi Klas II Wonosobo untuk diverifikasi dan



ditentukan jadwal foto dan biometriknya. Setelah itu Jamaah didampingi pembuatan paspornya di Kantor Imigrasi Klas II Wonosobo oleh petugas Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo.

Prosedur ini diterima dengan baik pihak imigrasi dan calon jamaah haji, karena selain bisa meringankan pihak imigrasi dalam melayani, jamaah juga diuntungkan dengan kepastian waktu untuk mengurus pembuatan paspor sehingga jamaah cukup datang sekali paspor sudah bisa selesai.

Untuk lebih memasyarakatkan layanan haji dan umrah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo telah mencanangkan program Dialog Interaktif Layanan Haji dan Umrah di Irama Fm yaitu sebuah dialog interaktif yang membahas beragam produk layanan haji dan umroh di radio publik. Kegiatan ini ditujukan untuk seluruh masyarakat Purworejo agar memahami regulasi penyelenggaraan haji dan umroh, mengenal bagaimana proses ibadah haji, yang diawali dari pendaftaran, pemberangkatan, rangkaian ibadah haji dan pemulangan. Selain itu dibahas juga produk rekomendasi paspor umroh, PPIU, PIHK, KBIHU.



**Gambar 7. Kegiatan Dialog Interaktif di Irama Fm**

Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kab.Purworejo juga menyelenggarakan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan. Survei ini ditujukan kepada masyarakat umum yang menggunakan layanan di lingkungan seksi Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo. Waktu pelaksanaan survey: September-November 2020 dengan jumlah partisipan sebanyak 206 orang. Data profil partisipan berupa: Nama, Usia, Pekerjaan, Pendidikan, Alamat, Jenis Kelamin.

Hasil survey secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kualitas layanan dan persepsi korupsi. Secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Kualitas layanan

Secara umum kualitas layanan di lingkungan Kemenag Kab. Purworejo khususnya pada seksi PHU sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil survei dari 6 pertanyaan terkait kualitas layanan, rata-rata 73 persen menjawab sangat baik. Sektor layanan yang perlu ditingkatkan pada kecepatan layanan serta tingkat kebersihan dan kenyamanan di lingkungan kantor.

- Persepsi Korupsi

Hasil persepsi korupsi responden terhadap layanan yang ada di lingkungan Kemenag Kab. Purworejo khususnya pada Seksi PHU sangat baik. Berdasarkan hasil survei 100 persen responden tidak pernah menemukan indikasi korupsi atau mendengar adanya budaya korupsi. Dari 3 pertanyaan yang diajukan mengenai adanya indikasi korupsi, semua responden menjawab tidak menemukan adanya indikasi korupsi.

#### **1.1.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-

Undang tersebut, Kantor Kementeraian Agama Kabupaten Purworejo berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, Keberhasilan dari mutu pendidikan tersebut dapat dilihat dari indikator berikut: 1. APK RA/ Pratama Widya Pasraman; 2. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 3. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; 4. APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; 5. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 6. APM MTs/Wustha/SMPTK; 7. APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman. Pengukuran keberhasilan dari indikator tersebut berada pada level Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.

Adapun lembaga pendidikan yang terdapat di lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kemenag Kabupaten Purworejo**

No	Jenis	Unit Kerja Pengampu	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga Pendidikan	Jumlah Peserta Didik
1	Pendidikan Umum berciri khas Agama	Seksi Pendidikan	RA	42	1961
		Pendidikan	MI	48	6099
		Madrasah	MTs	18	7662
			MA	10	3782
2	Pendidikan Keagamaan	Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal TingkatWustha Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal TingkatUlya	0	0
				0	0
		Gara Katolik	SMTK Kristen	1	12

*Sumber : KDA Tahun 2019*

Berdasarkan grafik peserta didik RA, MI, MTs, MA bahwa dari tahun ke tahun jumlah peserta didik selalu meningkat hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo melalui lembaga pendidikan yang dimilikinya telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia. Dan pada sisi

lain, data tersebut juga menunjukkan animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo semakin tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan umum berciri khas agama telah menjadi pilihan bagi masyarakat.

Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat juga dilakukan dengan berian bantuan untuk pengembangan lembaga pendidikan. Berbagai bantuan yang disalurkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo bagi lembaga pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara lain: Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTS, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya. Data alokasi anggaran BOP bagi Raudhatul Athfal dan BOS untuk lembaga pendidikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**Jumlah Alokasi BOP dan BOS bagi Lembaga Pendidikan Umum**  
**berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan**

Jenis Lembaga	Agama	Jenis Bantuan	Lembaga Pendidikan	2015 (siswa)	2016 (siswa)	2017 (siswa)	2018 (siswa)	2019 (siswa)
Pendidikan Umum berciri khas Agama	Islam	BOS	MI	3906	4398	4427	4920	4946
		BOS	MTs	4457	4559	4477	4719	4870
		BOS	MA	1787	2023	2003	2394	2661
Pendidikan Keagamaan	Islam	BOS	Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Wustha	0	0	0	0	0

Sumber: Seksi Dikmad dan Pontren

Kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa madrasah dan

santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Wilayah untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu Madrasah Negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Namun pada tahun 2018, anggaran PIP untuk siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan PIP bagi santri pada tahun 2018, tahun 2019 anggaran PIP bagi santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal kembali dikelola oleh wilayah.

**Tabel 14**  
**Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP**

No	Jenjang	Jumlah Penerima BSM Th 2015 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2016 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2017 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2019 (siswa/santri)
1	MI	1429	1000	1000	1143
2	MTs	1315	1000	1000	1421
3	MA	398	400	400	554
4	Ula	1	1	0	0
5	Wustha	24	16	54	22
6	Ulya	39	66	49	55

Sumber: Seksi Dikmad dan Pontren

Selain peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo juga berkontribusi dalam peningkatan akses masyarakat, khususnya kalangan santri untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk seleksi beasiswa bagi santri berprestasi untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

#### **1.1.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**Data Nilai Rata-Rata Hasil UN**

<b>Jenjang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
MTs	53,37	55,03	55,41	57,82
MA	56,87	55,42	58,12	59,08

Sumber Seksi Dikmad (dicek dulu)

Hasil Ujian Nasional siswa madrasah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini memperkuat bukti adanya peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Pada sisi lain, evaluasi pembelajaran agama di lembaga pendidikan formal/sekolah umum dilakukan salah satunya melalui Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Nilai rata-rata USBN Pendidikan Agama tahun 2015 s.d. 2019 di Kabupaten Purworejo sebatas pada Agama Islam dan Katolik, hal ini untuk mencerminkan bahwa penyelenggaraan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Purworejo adalah penyelenggaraan Islam dan Katolik. Agama Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu akan disajikan pada tingkat Kantor Wilayah. Capaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:



**Tabel 16**  
**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019**

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	7,6	7,8	8,1	7,5
2	2016	7,4	7,5	7,7	8,0
3	2018	7,8	8,1	7,8	7,4
4	2019	8,0	7,8	7,5	7,6

Sumber Seksi PAIS

**Tabel 17**  
**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah**  
**Tahun 2015 s.d. 2019**

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA	
		MIN	MTsN
1	2016	61,63	56,63
2	2017	60,66	55,03
3	2018	62,12	56,60
4	2019	60,23	55,92

Sumber: Data Madrasah

**Tabel 18**  
**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Katolik Tahun 2015 s.d. 2019**

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	-	-	-	-
2	2016	-	-	-	-
3	2019	-	-	-	-

Sumber Gara Katolik

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat kecenderungan penurunan nilai rata-rata nilai USBN Agama hampir dalam agama. Salah satu penyebab dari penurunan rerata nilai USBN Agama adalah bobot kesulitan soal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Disamping data terkait rerata hasil UN dan USBN

Agama, salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dapat dilihat dari kualitas lulusan yang dihasilkan.

Pada awalnya, tahun 2017 integritas siswa masih diasumsikan hanya sebatas penilaian tentang kejujuran siswa dalam pelaksanaan Ujian nasional. Pada tahun 2018, aspek- aspek lain diukur dalam penilaian indeks integritas siswa. Dari target 75, capaian siswa madrasah di JAWA TENGAH baru sebesar 71,6. Namun, belum dapat diungkap, pada aspek mana nilai capaian kurang dan di aspek mana nilai yang dihasilkan cukup tinggi. Pada tahun 2019, capaian siswa madrasah JAWA TENGAH dalam pengukuran indeks integritas mencapai 100 dari angka target yang ditetapkan sebesar 80. Hal ini tentu menjadi sebuah capaian yang harus dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.

#### **1.1.6 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Program**

##### **Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Kabupaten Purworejo ditandai dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan sejak tahun 2017. Pada 2019, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo mendapatkan nilai ZI sebesar 50,6 dan pada 2020 meningkat pesat menjadi 81,68.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas tidak lepas dari pengejawantahan 2 (dua) komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari 6 (enam) area perubahan yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator- indikator dari 6 (enam) area perubahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata Kelola pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, uraian dari

area perubahan tersebut adalah :

a. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Capaian melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kementerian Agama Kabupaten Purworejo sebagai Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK /WBBM;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Ditetapkannya agen perubahan tahun 2020-2021;

b. Penataan Tatalaksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian pada area ini adalah:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Kementerian Agama Kabupaten Purworejo di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kementerian Agama Kabupaten Purworejo menggunakan berbagai aplikasi dalam melakukan proses bisnisnya. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan kinerja unit menggunakan aplikasi e-kinerja, LRA, SAS, OMSPAN, Aplikasi IKM, dsb. Untuk aplikasi manajemen kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Purworejo menggunakan aplikasi SIMPEG, untuk mengelola tata persuratan Kemenag Kabupaten Purworejo menggunakan aplikasi tata persuratan. Dalam pelayanan publik, digunakan juga berbagai aplikasi yaitu: aplikasi Silakon JSS, Aplikasi PTSP

(Pelayanan Terpadu Satu Pintu), SIMKAH, SISKOHAT, PPDB online. Pada tahun 2020 ini direncanakan pembangunan aplikasi e-disposisi dan pembaharuan aplikasi PTSP.

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Kementerian Agama Kabupaten Purworejo di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dapat dilihat dari capaian pembangunan zona integritas Kementerian Agama Kabupaten Purworejo seperti yang terlihat pada tabel 22 diatas.

c. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Capaian dari program ini adalah :

1. Keterlibatan Pimpinan: pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan.
2. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja.
3. Penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui Rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja;
4. Mengadakan rapat pemantauan pencapaian kinerja bulanan.
5. Membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan
6. Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)
7. Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely/Continuity)*. Memiliki IKU tambahan yang *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely/Continuity)*
8. Laporan kinerja disusun tepat waktu

9. Menyusun LKIP secara tepat waktu (bulan januari pada tahun berikutnya)
  10. Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja
  11. Laporan kinerja (LKIP) telah memberikan informasi tentang kinerja
  12. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Mengirimkan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti diklat dan bimtek
  13. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
- d. Penataan Sistem SDM
- Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian dari program ini adalah:
1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;
  2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  3. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;
  4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;
  5. Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
  6. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai setiap semester.
- e. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Agama Kabupaten Purworejo yang bersih dan bebas KKN. Capaian dari program ini adalah:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
  2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
  3. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan Keuangan;
  4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, dengan dibentuknya unit pengendali gratifikasi, tim penanganan benturan kepentingan, satgas SPIP, tim penanganan pengaduan masyarakat dan tim penanganan *whistle blowing system*
  5. Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap dua bulan terhadap pelaksanaan pengawasan, serta menyegerakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
  6. Diterapkannya program pengawasan dengan pendekatan agama bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;
  7. Diketuk banner sebagai *public campaign*
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih mudah dijangkau, dan lebih nyaman) dengan adanya berbagai aplikasi yang menunjang pelayanan publik seperti: hajipintar, Siskohat, PTSP, Simkah, dan lain sebagainya;
2. Indeks kepuasan masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Purworejo ada di tingkat memuaskan.

Komponen Hasil dari Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, adalah pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, capaian dari komponen ini adalah :

1. Hasil survei persepsi korupsi pada tahun 2020 sangat baik, artinya tidak ditemukan adanya indikasi korupsi dan tidak terdengar adanya budaya korupsi
2. Nilai kualitas pelayanan publik pada tahun 2020 adalah 3,72 (memuaskan)

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa mempengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada masa-masa mendatang.

### **1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama**

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Purworejo dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah: adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang

terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat, namun di sisi lain tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya.

### **1.2.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama**

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dalam peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama:

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
- b. Telah terbentuk FKUB Kabupaten Purworejo ;
- c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;



- b. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
- c. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu;
- d. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

### **1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan**

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama:

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di Seksi penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;
- c. Peningkatan jumlah pendaftar haji merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat

berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, dengan adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal;

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa pelayanan;
- b. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
- c. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk penyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal;

#### **1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan**

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
- b. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
- c. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
- d. Sesuai buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, dimungkinkan KBM pendidikan diniyah diselenggarakan di tiap-tiap

SD, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan sekolah setempat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan adalah:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga pendidikan keagamaan;
- c. Belum maksimalnya dukungan pendanaan dari pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah.

#### **1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan berciri khas agama dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- a. Kabupaten Purworejo sebagai kota pelajar, terdapat banyak perguruan tinggi yang dapat dilakukan kerjasama untuk pengembangan madrasah dan lembaga pendidikan umum berciri agama;
- b. Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;
- c. Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, MYERS, maupun KTI;
- d. Penerapan *e-learning* sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif.
- e. Guru dan pengawas PAI di Kabupaten Purworejo banyak yang sudah ditetapkan menjadi instruktur pengembangan kurikulum 13 tingkat nasional;
- f. Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dan lembaga pendidikan keagamaan :

- a. Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi, baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya;
- b. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada, masih banyak dilakukan tugas rangkap;
- c. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi padahal sudah mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan sudah mendapatkan SK Dirjen Pendis;
- d. Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitungan jam pelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan;
- e. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **2.1 Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo**

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

#### **2.2 Sasaran Kegiatan Kementerian Agama Kab. Purworejo**

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kementerian Agama Kabupaten Purworejo menetapkan 54 (lima puluh empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tahun 2024. Adapun sasaran strategis dan sasaran program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

**Tabel 19**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program**  
**(SS1)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya pemahaman dan kualitas pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 22), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo , yaitu meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

- a. Nilai kinerja penyuluh agama;
- b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
- c. Jumlah penyiara agama yang dibina kompetensi;
- d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.

**Tabel 20**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS2)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama</li> <li>2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama</li> <li>4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat</li> </ol>

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 23), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo , yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
  - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
  - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.

2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
  - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
  - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
  - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;

- b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
  - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
  - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
  - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
  - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
  - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
  - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
  - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
  - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama
  - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama
9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
  - b. Persentase peningkatan peserta didik pada pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an yang berwawasan moderat.

**Tabel 21**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS3)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama



Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 24), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo , sebagai berikut :

1. Menguatnya dialog agama dan budaya yaitu jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan.
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai, yaitu : jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak).
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama, yaitu : jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, STQ, Ustawa, Pesparawi dll).
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina
  - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina

**Tabel 22**

**Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS4)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur Keagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan Ibadah Haji yang Transparan dan Akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 25), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Purworejo , sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
  - b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi
  - c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan
  - d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
  - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
  - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
  - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
  - e. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
  - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji;

**Tabel 23**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS5)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan</li> <li>2. Persentase peningkatan wakaf produktif</li> </ol>

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 26), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo , sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase amil yang dibina;
  - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
  - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan.
3. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina
  - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
  - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat

**Tabel 24**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS6)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 27), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo , yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
  - b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
  - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
  - b. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan
  - c. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan
  - d. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
  - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

**Tabel 25****Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS7)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas Pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 28), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
  - f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
  - g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah.

- b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah
  - c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah Keagamaan;
  - d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;
  - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP.

**Tabel 26**

**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS8)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan</li> <li>2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP</li> </ol>

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 29), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi;
  - b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
  - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi

- d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG
  - e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
    - a. Persentase guru di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
    - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
  3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase Guru Madrasah/sekolah keagamaan yang mengikuti PPG;
    - b. Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG;
    - c. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2.
  4. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus
    - b. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

**Tabel 27**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 9)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 30), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo, yaitu :

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

**Tabel 28**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS10)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 31), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo, yaitu : Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
- b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina.

**Tabel 29**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 11)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel



Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 32), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo, yaitu :

1. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal yaitu: Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan;
2. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yaitu: Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra
  - b. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
  - c. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
4. Meningkatnya kematangan pengendalian intern dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel
  - b. Persentase data yang komprehensif, valid dan reliabel
5. Meningkatnya ASN yang profesional dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)
  - b. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya.
6. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
  - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
  - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
  - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.

7. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar neger idengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
  - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
  - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti;
  - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
  - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
  - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
  - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
  - g. Persentase data ASN yang diupdate;
  - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
9. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
  - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
  - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
  - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
10. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabeldengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
  - b. Persentase tanah yang bersertifikat;

- c. Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN.
11. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
  - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
  - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
12. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
  - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
  - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggarandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
  - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
  - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
14. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggarandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
  - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
15. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantordengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
16. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasadengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;

- b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
  - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
  - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
  - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
17. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
18. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
  - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
19. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
  - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
20. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

### **2.2.1 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**

Dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran kegiatan. Rumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 33.

**Tabel 30**  
**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja**  
**Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo**  
**Tahun 2020-2024**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah penyalur agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1. Menggunakan Instrumen/ Aplikasi Penyuluh Agama (PNS dan Non PNS) 2. jumlah penyuluh agama yang dibina dibagi jumlah seluruh penyuluh agama 3. Jumlah penyalur agama yang dibina kompetensinya 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Bimas Islam Zawa, Gara Katolik, TU.	Bimas Islam Zawa, Gara Katolik, TU.	Tahunan Triwulana Triwulanan Triwulanan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	1. Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama dikali 100% 2. Jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan.	KUB	KUB	Tahunan Tahunan Tahunan

3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	1. Jumlah Update Data Valid Lembaga agama, Organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mendapatkan fasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	KUB	KUB	Tahunan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Layanan Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah Layanan Sekber FKUB	KUB	KUB	Tahunan
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dibagi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	KUB, Bimas Islam Zawa	KUB, Bimas Islam Zawa	Tahunan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh agama yang berwawasan moderat dibagi penyuluh agama	zawa, Bimas Islam Gara Katolik	zawa, Bimas Islam Gara Katolik	Tahunan

7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rumah ibadah yang ramah</li> <li>2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina</li> <li>3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya</li> <li>4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rumah ibadah yang ramah dibagi Jumlah rumah ibadah</li> <li>2. Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi pengelola rumah ibadah</li> <li>3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya</li> <li>4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan (Islam)</li> </ol>	Bimas Islam Gara Katolik	Bimas Islam Gara Katolik	Tahunan
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Bimas Islam Gara Zawa Gara Katolik	Bimas Islam Gara Zawa, Katolik	Tahunan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;</li> <li>2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> </ol>	Seksi Dikmad, Pais, Pontren	Seksi Dikmad, Pais, Pontren	Tahunan

		<p>4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>9. Persentase pengawas Pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p>	<p>4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</p> <p>9. Persentase pengawas Pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</p>	Seksi Dikmad, Pais, Pontren	Tahunan	Tahunan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	<p>1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat</p> <p>2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an</p>	<p>1. Jumlah pesantren yang berwawasan moderat dibagi Jumlah pesantren</p> <p>2. Jumlah Kenaikan Peserta Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al- Qur'an dibagi total pendidikan Diniyah Takmiliyah dan pendidikan Al-Quran tahun sebelumnya dikali 100%</p>	Seksi Pontren	Seksi Pontren	Tahunan
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	KUB	KUB	Tahunan



12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Bimas Islam, Gara Katolik TU	Bimas Islam, Gara Katolik TU	Tahunan
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Bimas Islam, Gara Katolik TU	Bimas Islam, Gara Katolik TU	Tahunan
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi</li> <li>2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi</li> <li>2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina</li> </ol>	Bimas Islam Gara Katolik TU	Bimas Islam Gara Katolik TU	Tahunan

15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;</li> <li>2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;</li> <li>3. Persentase lembag keagamaan yang difasilitasi;</li> <li>4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;</li> <li>5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;</li> <li>2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;</li> <li>3. Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi dibagi Jumlah lembaga keagamaan</li> <li>4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;</li> <li>5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;</li> </ol>	Bimas Islam, Gara Katolik	Bimas Islam, Gara Katolik	Tahunan
				Bimas Islam,	Bimas Islam,	Tahunan
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang direvitalisasi</li> <li>2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>5. Jumlah penghulu yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang direvitalisasi (SBSN)</li> <li>2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>5. Jumlah penghulu yang dibina</li> </ol>	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
						Tahunan
						Bulanan
						Bulanan
						Semester
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/s ukinah/hitta sukhaya	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/s ukinah/hitta sukhaya	Bimas Islam Gara Katolik TU	Bimas Islam Gara Katolik TU	Tahunan

18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	PHU	PHU	Tahunan
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan  2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	1. Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi Jumlah pusat layanan haji  2. Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan dibagi calon jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan  Tahunan
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi Jumlah jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohat dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina ; 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	1. Jumlah amil yang dibina dibagi Jumlah amil ; 2. Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi Jumlah lembaga zakat	Gara zawa	Gara zawa	Tahunan

24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase lembagawakaf yang dibina</li> <li>2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan</li> <li>3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga wakaf yang dibina dibagi Jumlah lembaga wakaf</li> <li>2. Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi Jumlah akta ikrar wakaf</li> <li>3. Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dibagi Jumlah tanah wakaf</li> </ol>	Gara zawa	Gara zawa	Tahunan
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;</li> <li>2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode</li> <li>3. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;</li> <li>4. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode</li> <li>5. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;</li> <li>6. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan ;</li> <li>7. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah madrasah;</li> <li>2. Jumlah pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode</li> <li>3. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;</li> <li>4. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode</li> <li>5. pembelajaran inovatif dalam kurikulum;</li> <li>6. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan ;</li> <li>7. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi Pontren	Tahunan

26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan</li> <li>3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan</li> <li>4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan ;</li> <li>3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan .</li> <li>4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</li> <li>2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</li> <li>2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Tahunan

28	Meningkatnya kualitas sarana dan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Mady ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>4. Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Ut ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana</li> <li>6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya</li> <li>7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah MTs/Wustha/ SMPTK/Mady ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>4. Jumlah MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Ut ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>5. Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren</li> <li>6. Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya</li> <li>7. Perbandingan sekolah minggu yang memenuhi SPM sarana prasarana dengan yang belum</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Tahunan
----	---	---	--	---	---	---------

29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</li> <li>2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;</li> <li>3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan</li> <li>4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</li> <li>2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;</li> <li>3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan</li> <li>4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Tahunan
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi</li> <li>2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi</li> <li>2. Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi Pontren,	Seksi Dikmad Seksi Pontren,	Tahunan
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Tahunan

32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;</li> <li>2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>3. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>4. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;</li> <li>5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;</li> <li>2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>3. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;</li> <li>5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Pontren	
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> <li>2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> <li>2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG</li> <li>3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1</li> <li>4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG</li> <li>3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1</li> <li>5. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren	Tahunan



35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi Pontren	Seksi Dikmad Seksi Pontren	Tahunan
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Tahunan
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu</li> <li>3. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu</li> <li>2. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Tahunan
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase MTs/MA /SMPTK/SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</li> <li>2. Persentase kepala pendidikan Diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman</li> <li>3. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase MTs/MA /SMPTK/SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</li> <li>2. Persentase kepala pendidikan Diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman</li> <li>3. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Tahunan

39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</li> <li>2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</li> <li>2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina</li> </ol>	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Seksi Dikmad Seksi PAIS Seksi Pontren Gara Katolik	Tahunan
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase produk hukum yang diterbitkan</li> <li>2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan</li> <li>3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah produk hukum yang diterbitkan</li> <li>2. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan</li> <li>3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan</li> </ol>	TU	TU	Tahunan
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</li> <li>2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti</li> <li>3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan</li> <li>4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)</li> <li>5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</li> <li>6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</li> <li>2. Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti</li> <li>3. Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan</li> <li>4. Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)</li> <li>5. Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</li> <li>6. Jumlah data ASN yang diupdate</li> </ol>	TU	TU	Semester

42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,</li> <li>2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</li> <li>3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</li> <li>4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.</li> <li>2. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</li> <li>3. Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</li> <li>4. Jumlah penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</li> </ol>	TU	TU	Semester
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</li> <li>2. Persentase tanah yang bersertifikat</li> <li>3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</li> <li>2. Jumlah tanah yang bersertifikat</li> <li>3. Jumlah nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN</li> </ol>	TU	TU	Semester

44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</li> <li>2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</li> <li>3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</li> <li>2. Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</li> <li>3. Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</li> </ol>	TU	TU	Tahunan
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</li> <li>3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</li> <li>3. Jumlah Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</li> </ol>	TU	TU	Tahunan
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase output perencanaan yang berbasis data</li> <li>2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra</li> <li>3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah output perencanaan yang berbasis data</li> <li>2. Jumlah keselarasan muatan Renja dengan Renstra</li> <li>3. Jumlah perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti</li> </ol>	TU	TU	Tahunan

47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas</li> <li>2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas</li> <li>2. Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti</li> </ol>	TU	TU	Tahunan
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	TU	TU	Triwulan
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu</li> <li>2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik</li> <li>3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen</li> <li>4. Persentase menurunnya lelang gagal</li> <li>5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu</li> <li>2. Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik</li> <li>3. Jumlah surat yang diarsipkan dalam e-dokumen</li> <li>4. Jumlah menurunnya lelang gagal</li> <li>5. Jumlah menurunnya sanggah dan sanggah banding</li> </ol>	TU	TU	Triwulan
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Jumlah kepuasan pelayanan tamu pimpinan	TU	TU	Triwulan

51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi</li> <li>2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi</li> <li>2. Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter</li> </ol>	TU	TU	Semester
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah system informasi yang memenuhi standar</li> <li>2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar</li> <li>2. Jumlah data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable</li> </ol>	TU	TU	Semester
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	TU	TU	Triwulan

Sumber : Tata Usaha, 2020

## **2.2.2 Nilai-nilai Kementerian Agama**

Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kesanggupan, kekuatan serta menjaga kepercayaan umat dalam melaksanakan pembangunan di Seksi agama dan pendidikan. Untuk itu, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang berisi Nilai-Nilai Dasar, meliputi :

### **1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa**

Dalam keimanan dan ketaqwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketaqwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. menumbuhkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. membina kerukunan hidup beragama;
- g. tidak bertindak diskriminatif;
- h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

### **2. Integritas**

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. tidak melakukan tindakan yang mereayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun oranglain;
- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

### **3. Profesionalitas**

Dalam profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;



- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

#### **4. Tanggung Jawab**

Dalam tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pelaksanaan nilai tanggungjawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan tugas secara patuh, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama;
- e. melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;
- f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

#### **5. Keteladanan**

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan

kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

## **BAB III**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1 Target Kinerja**

Dalam rangka menjalankan menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, pada tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo memiliki strategi melalui 9 (Sembilan) Program sebagai berikut :

1. Sementara itu, mulai tahun 2021 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo menjalankan arah kebijakan tersebut melalui Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama,
2. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah,
3. Program Pendidikan Islam,
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam,
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen,
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik,
7. Program Bimibingan Masyarakat Hindu,
8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha,
9. Program Kerukunan Umat Beragama.

Program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran
4. Program Paud Dan Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah

9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
11. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
13. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
15. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha
16. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
17. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
18. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
19. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
20. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
21. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
22. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
23. Pelayanan Haji Dalam Negeri
24. Pembinaan Haji
25. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
26. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
27. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
28. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
29. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
30. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik
31. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
32. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
33. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan Program-program dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo menetapkan 6 (Enam) tujuan dan telah dilengkapi dengan 54 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dalam 5 tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 31**  
**Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo**  
**Sampai dengan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas Bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	80 80 66 42	90 96 158 108	Nilai % Orang Kelompok	Bimas Islam Gara Zawa, Gara Katolik, TU
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus Pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	100 30 1	100 150 5	% Orang Kelurahan	KUB
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	100 3	250 15	Lembaga/Orang Keg	KUB KUB
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	100	%	KUB

5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	70  1	80  5	%  Kegiatan	Bimas Islam Gara Zawa, Gara Katolik, TU
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	100	%	Bimas Islam zawa.
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam besar yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah Rumah Ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	90 96 152 95	75 76 80 80	% % Orang Lokasi	Bimas Islam
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	163	815	Kegiatan/ Konten	Bimas Islam Gara Katolik TU

9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	70	100	%	Dikmad, PAIS, Pontren, Gara Katolik
		2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	70	100	%	
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	60	80	%	
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	30	50	%	
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	95	100	%	
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	40	50	%	
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	40	50	%	
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	50	80	%	
		9. Persentase pengawas Pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	90	100	%	
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	100	100	%	PAIS, Pontren
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	100	100	%	

11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	16	16	Lokasi	KUB, Bimas Islam, Gara Katolik
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	16	16	Lokasi	Bimas Islam Gara Katolik zawa,
13	Meningkatnya penghormatan atas budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparani Pesparawi, MTQ, STQ, FASI, Ustawa dll)	17	85	Event	Bimas Islam Gara Katolik TU
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	2 10	2 10	Lokasi Lokasi	Bimas Islam, Gara Katolik TU
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan; 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan; 3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi; 4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan; 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	16 200 2 50 20	150 1000 10 250 100	Paket Buah % Kegiatan Kegiatan	Bimas Islam Gara Katolik TU



16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah 4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah 5. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	2 2 828 186 6500	10 10 1960 440 350	KUA KUA Orang Anak Buku/Kartu	Bimas Islam
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	30	150	Keluarga	Bimas Islam Gara Katolik TU
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	- 0,6	100 0	% %	Seksi Haji dan Umroh
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji	99,87	100	%	Seksi Haji dan Umroh

22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	10 100	70 100	% %	Bimas Islam zawa
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	100 30 78	100 80 90	% Akta %	Bimas Islam zawa
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ; 3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan 5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	89  15 90 4 0	95  20 100 6 0	%  % %  Madrasah	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren, Gara Katolik

26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	80	90	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren
		2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan	5 /3	9 /6	Kegiatan	
		3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan	2 /2	4 /3	Kegiatan	
		4. Persentase siswa yang mengikuti assesmen	10 /80	50 /100		
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadala yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran	20	50	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren
		2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran	10	50	%	

28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	30	42	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren, Gara Katolik
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	40	48	%	
		3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	40	50	%	
		4. Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	70	90	%	
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	0	3	%	
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	0	0	%	
		7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	0	0	%	
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	16.546	20.021	Siswa	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren, Semua Bimas
		2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;	0	20	%	
		3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	18	18	%	
		4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;	0	20	%	

30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	0  56	2  70	%  %	Seksi Dikmad Seksi Pontren
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	1.951	2.200	Siswa	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren, Gara Katolik, TU
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi; 2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG; 5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	0  0  0  15  9	0  0  0  20  15	  %  %  %  %	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren, Gara Katolik
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	80	100	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren,

34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG 3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	3 9 480 0	10 64 600 0	% % % %	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren,
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus 2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	0 0 0	0 0 0	- -	Seksi Madrasah, PAIS, Pontren,
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	22	35	Madrasah	Seksi Madrasah, PAIS, Pontren,
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/PDF /sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	50 0	70 3	% %	Seksi Madrasah, PAIS, Pontren,

38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	100	%	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren,
		2. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	0	5	%	
		3. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	100	100	%	
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	75	77	Organisasi Ekstra Kurikuler	Seksi Dikmad, PAIS, Pontren, Gara Katolik
		2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina	75	77	Gugus	
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan	75	90	%	TU
		2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	80	100	%	
		3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	10	10	Kegiatan	

41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	80	90	%	TU
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	75	85	%	
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	80	95	%	
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	30	70	%	
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	50	75	%	
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	70	90	%	
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	90	115	Dokumen	TU
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	80	95	%	
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	99	100	%	
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	80	100	%	
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	80	90	%	TU
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	95	100	%	
		3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	80	95	%	



44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	70	90	%	TU
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	70	90	%	
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	70	90	%	
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	80	90	%	TU
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	1	1	Satker	
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	4	8	Orang	
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	80	95	%	TU
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	60	80	%	
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	65	75	%	
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	80	90	%	TU
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	70	85	%	
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	80	90	%	TU

49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	80	90	%	TU
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	80	95	%	
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	85	95	%	
		4. Persentase menurunnya lelang gagal	0	0	%	
		5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	0	0	%	
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	75	90	%	TU
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	80	95	%	TU
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	80	95	%	
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	1	1	%	TU
		2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	75	90	%	
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	13	13	%	TU

Sumber: Tata Usaha, 2020

### 3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Dalam Negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo 2020- 2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo sampai dengan 2024 pada tabel berikut :

**Tabel 32**  
**Indikasi Kebutuhan Pendanaan 9 (Sembilan) Program**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo 2020-2024**

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEMENAG Kabupaten Purworejo</b>	<b>76.607.952</b>	<b>24.820.651</b>	<b>25.149.836</b>	<b>25.628.584</b>	<b>26.204.904</b>	<b>178.411.927</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama</b>	<b>2.742.600</b>	<b>2.874.714</b>	<b>2.876.254</b>	<b>2.915.002</b>	<b>2.951.322</b>	<b>14.359.892</b>
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-	8.460	10.000	10.000	10.000	38.460
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-	6.470	7.000	10.000	10.000	33.470
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	2.163.652	2.199.069	2.234.254	2.270.002	2.306.322	11.173.300
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-	22.790	23.000	23.000	23.000	91.7
Pembinaan Administrasi Umum	578.948	588.948	600.000	600.000	600.000	2.978.296
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-	1.600	2.000	2.000	2.000	7.600
<b>Program Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>23.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>253.000</b>
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	23.000	80.000	50.000	50.000	50.000	253.000

<b>Program Bimbingan Masyarakat Islam</b>	<b>19.669.145</b>	<b>19.862.355</b>	<b>20.220.000</b>	<b>20.660.000</b>	<b>21.200.000</b>	<b>101.611.500</b>
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	16.262.147	16.668.662	16.860.000	17.130.000	17.500.000	84.420.809
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	1.526.700	1.247.493	1.300.000	1.350.000	1.400.000	<b>6.824.193</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	2.000.	22.000	50.000	60.000	70.000	<b>202.002</b>
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	1.878.298	1.920.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	<b>10.098.298</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	0	4.200.	10.000	20.000	30.000	64.200
<b>Program Pendidikan Islam</b>	<b>51.787.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.787.735</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	7.858.744	0	0	0	0	7.858.744
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	3.151.250	0	0	0	0	3.151.250
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	14.124.100	0	0	0	0	14.124.100
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	13.180.698	0	0	0	0	13.180.698
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	13.472.943	0	0	0	0	13.472.943
<b>Program Bimbingan Masyarakat Kristen</b>	<b>626.575</b>	<b>370.790</b>	<b>370.790</b>	<b>370.790</b>	<b>370.790</b>	<b>2.109.735</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	176.999.	138.895	138.895	138.895	138.895	723579
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	111.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	<b>269.576</b>	<b>138.895</b>	<b>130.895</b>	<b>130.895</b>	<b>130.895</b>	<b>130.895</b>
<b>Program Bimbingan Masyarakat Katolik</b>	<b>713.076</b>	<b>725.792</b>	<b>725.792</b>	<b>725.792</b>	<b>725.792</b>	<b>3.616.244</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	90.950	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	42.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggara Katolik	182.432	189.622	189.622	189.622	189.622	189.622
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	397.694	293.570	293.570	293.570	293.570	293.570

Pendidikan Penyelenggara Katolik						
<b>Program Bimbingan Masyarakat Hindu</b>						
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Hindu	0	0	0	0	0	0
<b>Program Bimbingan Masyarakat Buddha</b>						
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	0	0	0	0	0	0
<b>Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah</b>	<b>1.045.821</b>	<b>907.000</b>	<b>907.000</b>	<b>907.000</b>	<b>907.000</b>	<b>4.673.821</b>
Pelayanan Haji Dalam Negeri	71.871	30.000	30.000	30.000	30.000	191.871
Pembinaan Haji	66.950	40.000	40.000	40.000	40.000	229.950
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	907.000	837.000	837.000	837.000	837.000	4.255.000

Sumber : Tata Usaha, 2020

**Tabel 33**  
**Indikasi Kebutuhan Pendanaan 4 (Empat) Program**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo 2020-2024**

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
<b>KEMENAG KAB. PURWOREJO</b>						
<b>Program Dukungan Manajemen</b>						
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-	8.460	10.000	10.000	10.000	38.460
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-	6.470	7.000	10.000	10.000	33.470
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	2.163.652	2.199.069	2.234.254	2.270.002	2.306.322	11.173.300
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-	22.790	23.000	23.000	23.000	91.7
Pembinaan Administrasi Umum	578.948	588.948	600.000	600.000	600.000	2.978.296
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-	1.600	2.000	2.000	2.000	7.600
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	0	837.000	837.000	837.000	837.000	3.348.000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	0	22.037.582	22.037.582	22.037.582	22.037.582	88.150.328
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	12.857.147	13.474.969	13.500.000	13.600.000	13.800.000	67.232.116
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	0	138.895	138.895	138.895	138.895	555.580

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	0	189.622	189.622	189.622	189.622	<b>758.488</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	0	287.970	287.970	287.970	287.970	<b>1.151.880</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama</b>						
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	0	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>320.000</b>
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1.526.700	1.247.493	1.300.000.	1.350.000	1.400.000	<b>6.824.193</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	2000	22.000	50.000	60.000	70.000	<b>200.202.000</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.878.298	1.920.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	<b>10.098.298</b>
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	0	4.200	10.000	20.000	30.000	<b>64.200</b>
Pelayanan Haji Dalam Negeri	0	30.000	30.000	30.000	30.000	<b>120.000</b>
Pembinaan Haji	66.950	40.000	40.000	40.000	40.000	229950
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	0	72.000	72.000	72.000	72.000	<b>288.000</b>
<b>Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran</b>						
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	740.000	1000.000	2000.000	3000.000	4000.000	<b>9.740.000</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	6.914.727	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	<b>34.914.727</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	0	23.000	23.000	23.000	23.000	<b>92.000</b>
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	13.180.698	0	0	0	0	13.180.698
<b>Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun</b>	<b>0</b>	<b>1.715.100</b>	<b>1.715.100</b>	<b>1.715.100</b>	<b>1.715.100</b>	<b>6.860.400</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	0	0	0	0	0	0

Sumber : Tata Usaha, 2020

## PENUTUP

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024 merupakan turunan dari Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kanwil dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Wilayah diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Disamping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Wilayah dalam mewujudkan pembangunan sektor agama maupun sektor pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo .

Plt. Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kab. Purworejo



Dis. H. Farid Solihin, MM.Pd

LAMPIRAN II  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 217.A TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 9 PROGRAM  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	2020	2021	TARGET			2020	ALOKASI (dalam ribu rupiah)				2024	UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN AGAMA							2022	2023	2024	72.891.578	45.398.048	73.900.000	74.900.000	75.900.000	PELAKSANA	
SK.1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama														Bimas Islam, Gara Katolik	
IKSK.1	Nilai kinerja penyuluh agama	Kab. Purworejo	Nilai	80	82	84	86	88	90							
IKSK.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	Kab. Purworejo	%	80	83	85	87	92	95							
IKSK.3	Jumlah penyar agama yang dibina kompetensi	Kab. Purworejo	Orang	27	50	75	100	118	145							
IKSK.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	16 Kecamatan	Kelompok	14	20	25	30	35	40							
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama														KUB	
IKSK.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti		%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina		Orang	30	30	60	90	120	150							
IKSK.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina		Desa	1	1	2	3	4	5							
SK.3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa														KUB	
IKSK.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi		Lembaga/O rang	100	130	160	190	220	250							
IKSK.2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan		Keg	15	18	21	24	27	30							
SK.4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)														KUB	
IKSK.1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP		%	100	100	100	100	100	100							
SK.5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama														Bimas Islam, Gara Zawa, Gara Katolik, TU	
IKSK.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama		%	75	76	77	78	79	80							
IKSK.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan		Kegiatan	1	1	2	4	6	8							
SK.6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														Bimas Islam	
IKSK.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		5	100	100	100	100	100	100							
SK.7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														Bimas Islam	
IKSK.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	51	54	60	65	70	75							
IKSK.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	60	64	68	72	76	80							
IKSK.3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya		Orang	14	14	14	14	14	14							
IKSK.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan		Lokasi	14	16	18	20	24	28							
SK.8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik														Bimas Islam	
IKSK.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Kegiatan/K onten	150	175	200	250	300	350							
SK.9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama														PAKIS dan DIKMAD	
IKSK.1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.2	Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100							
SK.10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam														PAKIS	
IKSK.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat		%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan AlQur'an		%	100	100	100	100	100	100							



SK.11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya															KUB, Bimas Islam
IKSK.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Lokasi	14	14	14	14	14	14								
SK.12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat															Bimas Islam
IKSK.1	Jumlah produk budaya berbasisagama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Lokasi	14	14	14	14	14	14								
SK.13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama															Bimas Islam, Bimas Katolik
IKSK.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Event	15	0	15	30	60	75								
SK.14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama															Bimas Islam, Bimas Katolik
IKSK.1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	Lokasi	2	2	3	3	4	5								
IKSK.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Pengelola	0	0	0	25	50	75								
SK.15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan															Bimas Islam, Bimas Katolik
IKSK.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Paket	14	30	60	90	120	150								
IKSK.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Buah	1000	2000	3000	4000	5000	6500								
IKSK.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	5	10	20	30	40	50								
IKSK.4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Layanan	50	100	200	300	400	500								
IKSK.5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Lokasi	20	20	50	75	100	150								
SK.16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)															Bimas Islam
IKSK.1	Jumlah KUA yang direvitalisasi	KUA	36	3	3	3	3	3								
IKSK.2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	KUA	36	1	2	1	1	1								
IKSK.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Orang	18137	2972	3972	4973	5973	6973								
IKSK.4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Anak	187	299	411	523	635	750								
IKSK.5	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina	Orang	0	0	0	0	0	0								
SK.17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga															Bimas Islam, Bimas katolik
IKSK.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Keluarga	70	100	200	400	500	570								
SK.18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus															PHU
IKSK.1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	0	5	5,50	6	6,6			
SK.19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji															PHU
IKSK.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	2000			
IKSK.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	5	793	0	0	0	0	71871	30	33	36	39			
SK.20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji															PHU
IKSK.1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IKSK.2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0			
SK.21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji															PHU
IKSK.1	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	%	99,87	100	100	100	100	100	66,95	40	60	65	70			
SK.22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu															PHU
IKSK.1	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	%	100	100	100	100	100	100	30	20	30	35	40			
SK.23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat															Gara Zawa
IKSK.1	Persentase amil yang dibina	%	0	0	55	70	80	96								
IKSK.2	Persentase lembaga zakat yang dibina	%	75	78	80	85	90	95								
SK.24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf															Gara Zawa
IKSK.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	Akta	15	20	40	60	70	90								
IKSK.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	90	91	92	93	94	95								
SK.25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif															PENMAD, PAKIS, Bimas Katolik
IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.2	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;	%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.3	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Madrasah	1	1	1	1	1	1								
IKSK.5	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan		0	0	0	0	0	0								
SK.26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan															PENMAD, PAKIS
IKSK.1	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan	Kegiatan	3	52	54	56	58	60								

IKSK.3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan		Kegiatan	3	9	9	9	9	9						
IKSK.4	Persentase siswa yang mengikuti assesmen	%		0	20	30	40	50	70						
<b>SK.27</b>	<b>Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran</b>														PENMAD, PAKIS
IKSK.3.1	Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%		80	82	84	86	88	90						
IKSK.3.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%		25	30	40	50	60	70						
<b>SK.28</b>	<b>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan</b>														PENMAD, PAKIS, Bimas Katolik
IKSK.1.1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%		60	63	66	69	72	75						
IKSK.1.2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%		60	63	66	69	72	75						
IKSK.1.3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%		70	73	76	79	82	85						
IKSK.1.4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%		70	73	76	79	82	85						
IKSK.1.5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	%		70	73	76	79	82	85						
IKSK.1.6	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%		0	0	0	0	0	0						
IKSK.1.7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	%		25	30	45	60	65	75						
<b>SK.29</b>	<b>Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat</b>														PENMAD, PAKIS
IKSK.2.1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Siswa		3800	4000	4100	4300	4450	5475						
IKSK.2.2	Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah	%		25	25	27	29	32	35						
IKSK.2.3	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	%		6	6	7	8	9	10						
IKSK.2.4	Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah	%		6	6	10	15	20	27						
<b>SK.30</b>	<b>Meningkatnya kualitas penanganan ATS</b>														PENMAD, PAKIS
IKSK.2.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	%		5	10	20	30	40	50						
IKSK.2.2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	%		10	20	30	40	50	60						
<b>SK.31</b>	<b>Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah</b>														PENMAD, PAKIS
IKSK.3.1	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	Siswa		100	150	200	300	400	500						
<b>SK.32</b>	<b>Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</b>														PENMAD, PAKIS, Bimas Katolik
IKSK.1.1	Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	%		0	0	0	0	0	0						
IKSK.1.2	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%		75	75	80	82	85	90						
IKSK.1.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%		65	65	70	75	80	90						
IKSK.1.4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	%		0	0	0	0	0	0						
IKSK.1.5	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	%		80	80	85	90	95	100						
<b>SK.33</b>	<b>Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal</b>														PENMAD, PAKIS
IKSK.2.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%		25	25	27	30	35	37						
IKSK.2.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%		25	25	27	30	35	37						
<b>SK.34</b>	<b>Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik</b>														PENMAD, PAKIS
IKSK.1.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%		5	5	10	15	20	25						
IKSK.1.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%		8	14	19	27	20	38						
IKSK.1.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%		50	60	70	80	90	100						
IKSK.1.4	Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	%		0	0	0	0	0	0						
<b>SK.35</b>	<b>Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan</b>														PENMAD, PAKIS
IKSK.1.1	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus														
IKSK.1.2	2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus														
<b>SK.36</b>	<b>Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi</b>														PENMAD, PAKIS
IKSK.1.1	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Madrasah		17	17	17	17	17	17						
<b>SK.37</b>	<b>Meningkatnya budaya mutu pendidikan</b>														PENMAD, PAKIS
IKSK.2.1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%		100	100	100	100	100	100						
IKSK.2.2	Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%		1	1	1	1	1	1						

SK.38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menenangkan dan bebas dari kekerasan															PENMAD, PAKIS
IKSK.1.1	Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.1.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	%	25	25	50	75	90	100								
IKSK.1.3	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	%	75	80	85	90	95	100								
SK.39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan															PENMAD, PAKIS, Bimas Katolik
IKSK.2.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Madrasah	11	11	11	11	11	11								
IKSK.2.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	Gugus	11	11	11	11	11	11								
SK.40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum															TU
IKSK.1.1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	%	75	75	80	85	86	90								
IKSK.1.2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%	80	84	88	92	96	100								
IKSK.1.3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan	10	0	10	10	10	10								
SK.41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)															TU
IKSK.1.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%	80	82	84	86	88	90								
IKSK.1.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	%	75	76	79	81	83	85								
IKSK.1.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%	80	83	86	89	92	95								
IKSK.1.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	30	40	55	60	65	70								
IKSK.1.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	50	55	60	65	70	75								
IKSK.1.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%	70	73	78	82	86	90								
SK.42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan															TU
IKSK.1.1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	90	90	95	100	110	115								
IKSK.1.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	80	83	86	89	92	95								
IKSK.1.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	99	99	99	99	99	100								
IKSK.1.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%	80	84	88	92	96	100								
SK.43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel															TU
IKSK.1.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	80	82	83	84	85	90								
IKSK.1.2	Persentase tanah yang bersertifikat	%	95	96	97	98	99	100								
IKSK.1.3	Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	%	80	80	83	85	90	95								
SK.44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi															TU
IKSK.1.1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	70	75	80	84	87	90								
IKSK.1.2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	%	75	75	80	84	87	90								
IKSK.1.3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	75	75	80	84	87	90								
SK.45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi															TU
IKSK.1.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	80	82	84	86	88	90								
IKSK.1.2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Satker	1	1	2	2	2	2								
IKSK.1.3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Orang	5	7	10	15	20	25								
SK.46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran															TU
IKSK.1.1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	%	80	83	86	89	92	95								
IKSK.1.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	60	64	68	72	76	80								
IKSK.1.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	65	67	69	71	73	75								
SK.47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran															TU
IKSK.1.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	80	82	84	86	88	90								
IKSK.1.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	70	73	76	79	82	85								
SK.48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor															TU
IKSK.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	80	82	84	86	88	90								
SK.49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa															TU
IKSK.1.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	80	82	84	86	88	90								
IKSK.1.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	80	83	86	89	92	95								
IKSK.1.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	85	88	90	91	93	95								
IKSK.1.4	Persentase menurunnya lelang gagal	%	0	0	0	0	0	0								
IKSK.1.5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	%	0	0	0	0	0	0								
SK.50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga															TU
IKSK.1.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	75	75	80	85	87	90								
SK.51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi															TU
IKSK.1.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	%	80	83	86	89	92	95								

IKSK.1.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter	%	80	83	86	89	92	95							
<b>SK.52</b>	<b>Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi</b>														TU
IKSK.1.1	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	Sistem	1	1	1	1	1	1							
IKSK.1.2	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	%	75	79	83	85	87	90							
<b>SK.53</b>	<b>Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan</b>														TU
IKSK.1.1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Orang	13	13	13	13	13	13							
<b>025.01-PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA</b>		<b>DAERAH</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>2098-Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN</b>										0	8.640	8.640	8.640	8.640	
<b>SK.1.2098.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum</b>														
IKSK.1.2098.1.1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	%	75	75	80	85	86	90							
IKSK.1.2098.1.2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%	80	84	88	92	96	100							
IKSK.1.2098.1.3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan	10	0	10	10	10	10							
<b>2099-Pembinaan Administrasi Kepegawaian</b>										0	6.470	6.470	6.470	6.470	
<b>SK.1.2099.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)</b>														
IKSK.1.2099.1.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%	80	82	84	86	88	90							
IKSK.1.2099.1.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	%	75	76	79	81	83	85							
IKSK.1.2099.1.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%	80	83	86	89	92	95							
IKSK.1.2099.1.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	30	40	55	60	65	70							
IKSK.1.2099.1.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	50	55	60	65	70	75							
IKSK.1.2099.1.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%	70	73	78	82	86	90							
<b>2100-Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN</b>										2.163.652	2.199.069	2.199.069	2.199.069	2.199.069	
<b>SK.1.2100.1</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan</b>														
IKSK.1.2100.1.1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	90	90	95	100	110	115							
IKSK.1.2100.1.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	80	83	86	89	92	95							
IKSK.1.2100.1.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	99	99	99	99	99	100							
IKSK.1.2100.1.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%	80	84	88	92	96	100							
<b>SK.1.2100.2</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel</b>														
IKSK.1.2100.2.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	80	82	83	84	85	90							
IKSK.1.2100.2.2	Persentase tanah yang bersertifikat	%	95	96	97	98	99	100							
IKSK.1.2100.2.3	Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	%	80	80	83	85	90	95							
<b>2101-Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana</b>										0	-	-	-	-	
<b>SK.1.2101.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi</b>														
IKSK.1.2101.1.1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	70	75	80	84	87	90							
IKSK.1.2101.1.2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	%	75	75	80	84	87	90							
IKSK.1.2101.1.3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	75	75	80	84	87	90							
<b>SK.1.2101.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi</b>														
IKSK.1.2101.2.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	80	82	84	86	88	90							
IKSK.1.2101.2.2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Satker	1	1	2	2	2	2							
IKSK.1.2101.2.3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Orang	5	7	10	15	20	25							
<b>2102-Pembinaan Administrasi Perencanaan</b>										0	22.790	22.790	22.790	22.790	
<b>SK.1.2102.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran</b>														
IKSK.1.2102.1.1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	%	80	83	86	89	92	95							
IKSK.1.2102.1.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	60	64	68	72	76	80							
IKSK.1.2102.1.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	65	67	69	71	73	75							
<b>SK.1.2102.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran</b>														
IKSK.1.2102.2.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	80	82	84	86	88	90							
IKSK.1.2102.2.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	70	73	76	79	82	85							
<b>2103-Pembinaan Administrasi Umum</b>										578.948	588.948	588.948	588.948	588.948	
<b>SK.1.2103.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa</b>														
IKSK.1.2103.1.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	80	82	84	86	88	90							
IKSK.1.2103.1.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	80	83	86	89	92	95							
IKSK.1.2103.1.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	85	88	90	91	93	95							
IKSK.1.2103.1.4	Persentase menurunnya lelang gagal	%	0	0	0	0	0	0							
IKSK.1.2103.1.5	Persentase menurunnya snggah dan sanggah banding	%	0	0	0	0	0	0							
<b>SK.1.2103.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga</b>														
IKSK.1.2103.2.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	75	75	80	85	87	90							

<b>2106-Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan</b>										0	1.600	1.600	1.600	1.600	
<b>SK.1.2106.1 Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi</b>															
IKSK.1.2106.1.1 Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar		Sistem	1	1	1	1	1	1							
IKSK.1.2106.1.2 Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable		%	75	79	83	85	87	90							
<b>SK.1.2106.2 Meningkatkan kualitas administrasi pendidikan keagamaan</b>															
IKSK.1.2106.2.1 Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional		Orang	13	13	13	13	13	13							
<b>025.06-PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH</b>	<b>DAERAH</b>										-	-	-	-	
<b>2126-Pembinaan Umrah dan Haji Khusus</b>															
<b>SK.6.2126.1 Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus</b>															
IKSK.6.2126.1.1 Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi		%	70	72	75	80	85	90							
<b>2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri</b>										71.971	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>SK.6.2147.1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji</b>															
IKSK.6.2147.1.1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan		%	50	60	70	80	90	100							
IKSK.6.2147.1.2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan		%	1	1	1	1	1	1							
<b>SK.6.2147.2 Meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji</b>															
IKSK.6.2147.2.1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan		%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.6.2147.2.2 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu		%	100	100	100	100	100	100							
<b>2148-Pembinaan Haji</b>										66.950	40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>SK.6.2148.1 Meningkatkan kualitas pembinaan jemaah haji</b>															
IKSK.6.2148.1.1 Persentase petugas haji yang profesional		%	88	88	88	88	88	88							
IKSK.6.2148.1.2 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji		%	95	95	96	96	96	97							
IKSK.6.2148.1.3 Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan		%	70	70	75	80	85	90							
IKSK.6.2148.1.4 Jumlah advokasi haji yang terselenggara		Kegiatan	34	34	34	34	34	34							
IKSK.6.2148.1.5 Persentase pembimbing haji yang bersertifikat		%	83	83	84	86	88	89							
<b>2149-Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu</b>															
<b>SK.6.2149.1 Meningkatkan kualitas pembinaan jamaah haji</b>															
IKSK.6.2149.1.1 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji		%	100	100	100	100	100	100							
<b>SK.6.2149.2 Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu</b>															
IKSK.6.2149.2.1 Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)		%	100	100	100	100	100	100							
<b>2150-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah</b>										907.000	837.000	837.000	837.000	837.000	
<b>SK.6.2150.1 Meningkatkan kualitas penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal</b>															
IKSK.6.2150.1.1 Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	NA	80	81	82	82	84							
<b>SK.6.2150.2 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi</b>															
IKSK.6.2150.2.1 Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	NA	85	86	87	88	90							
IKSK.6.2150.2.2 Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	80	80	85	90	90	95							
<b>SK.6.2150.3 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja</b>															
IKSK.6.2150.3.1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	70	70	71	72	73	75							
IKSK.6.2150.3.2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	91	92	93	93	94	94							
IKSK.6.2150.3.3 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	NA	85	86	87	88	90							
<b>SK.6.2150.4 Meningkatkan kematangan pengendalian intern</b>															
IKSK.6.2150.4.1 Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	70	75	75	80	80							
IKSK.6.2150.4.2 Persentase data agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	80	80	90	90	90	90							
<b>SK.6.2150.5 Meningkatkan ASN yang profesional</b>															
IKSK.6.2150.5.1 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	70	73	75	77	78							
IKSK.6.2150.5.2 Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	NA	75	77	78	80	82							
<b>025.07-PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM</b>	<b>DAERAH</b>														
<b>2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam</b>										7.858.744	-	-	-	-	
<b>SK.7.2127.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama</b>															
IKSK.7.2127.1.1 Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	80	80	85	85	90	95							
IKSK.7.2127.1.2 Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	75	75	80	80	80	85							
IKSK.7.2127.1.3 Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	85	85	100	100	100	100							
IKSK.7.2127.1.4 Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	90	95	95	95	100	100							
IKSK.7.2127.1.5 Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	85	85	90	90	95	100							
IKSK.7.2127.1.6 Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama		%	80	85	85	90	90	100							
IKSK.7.2127.1.7 Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	90	90	95	95	100	100							
IKSK.7.2127.1.8 Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama		%	90	90	100	100	100	100							

IKSK.7.2127.1.9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	90	95	95	100	100	100								
<b>SK.7.2127.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</b>															
IKSK.7.2127.2.1	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	75	75	80	82	85	90								
IKSK.7.2127.2.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	65	65	70	75	80	90								
IKSK.7.2127.2.3	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	80	80	85	90	95	100								
<b>SK.7.2127.3</b>	<b>Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan</b>															
IKSK.7.2127.3.1	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	90	95	100	100	100	100								
IKSK.7.2127.3.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan	Kegiatan	3	52	54	56	58	60								
IKSK.7.2127.3.3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan	Kegiatan	3	9	9	9	9	9								
IKSK.7.2127.3.4	Persentase siswa yang mengikuti assesmen	%	0	20	30	40	50	70								
<b>SK.7.2127.4</b>	<b>Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik</b>															
IKSK.7.2127.4.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%	5	5	10	15	20	25								
IKSK.7.2127.4.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%	8	14	19	27	20	38								
IKSK.7.2127.4.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%	50	60	70	80	90	100								
<b>2128-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam</b>									3.151.250	-	-	-	-	-	-	-
<b>SK.7.2128.1</b>	<b>Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi</b>															
IKSK.7.2128.1.1	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Madrasah	17	17	17	17	17	17								
<b>SK.7.2128.2</b>	<b>Meningkatnya budaya mutu pendidikan</b>															
IKSK.7.2128.2.1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.7.2128.2.2	Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	1	1	1	1	1	1								
<b>SK.7.2128.3</b>	<b>Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan</b>															
IKSK.7.2128.3.1	Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMIAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.7.2128.3.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	%	25	25	50	75	90	100								
IKSK.7.2128.3.3	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	%	75	80	85	90	95	100								
IKSK.7.2128.4.1	<b>Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam</b>															
IKSK.7.2128.4.2	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.7.2128.4.3	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AIQur'an	%	100	100	100	100	100	100								
<b>SK.7.2128.5</b>	<b>Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</b>															
IKSK.7.2128.5.1	Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	%	0	0	0	0	0	0								
IKSK.7.2128.5.2	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	75	75	80	82	85	90								
IKSK.7.2128.5.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	65	65	70	75	80	90								
IKSK.7.2128.5.4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	%	0	0	0	0	0	0								
IKSK.7.2128.5.5	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	80	80	85	90	95	100								
<b>SK.7.2128.6</b>	<b>Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik</b>															
IKSK.7.2128.6.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%	5	5	10	15	20	25								
IKSK.7.2128.6.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%	8	14	19	27	20	38								
IKSK.7.2128.6.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%	50	60	70	80	90	100								
<b>SK.5.2128.7</b>	<b>Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal</b>															
IKSK.7.2128.7.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	25	25	27	30	35	37								
IKSK.7.2128.7.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	25	25	27	30	35	37								
<b>SK.7.2128.8</b>	<b>Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan</b>															
IKSK.7.2128.8.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Madrasah	11	11	11	11	11	11								
IKSK.7.2128.8.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	Gugus	11	11	11	11	11	11								
<b>2129-Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah</b>									14.124.100	-	-	-	-	-	-	-
<b>SK.7.2129.1</b>	<b>Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam</b>															
IKSK.7.2129.1.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	NA	50	70	80	90	100								
IKSK.7.2129.1.2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AIQur'an	Kegiatan	2000	3000	7000	8000	9000	10000								



IKSK.7.2133.1.1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2133.1.2	Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2133.1.3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2133.1.4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2133.1.5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2133.1.6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2133.1.7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2133.1.8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2133.1.9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	100	100						
<b>SK.7.2133.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan</b>														
IKSK.7.2133.2.1	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	100	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2133.2.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan	Kegiatan	3	52	54	56	58	60							
IKSK.7.2133.2.3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan	Kegiatan	3	9	9	9	9	9							
IKSK.7.2133.2.4	Persentase siswa yang mengikuti assesmen	%	0	20	30	40	50	70							
<b>SK.7.2133.3</b>	<b>Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</b>														
IKSK.7.2133.3.1	Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	%	0	0	0	0	0	0							
IKSK.7.2133.3.2	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	75	75	80	82	85	90							
IKSK.7.2133.3.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	65	65	70	75	80	90							
IKSK.7.2133.3.4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	%	0	0	0	0	0	0							
IKSK.7.2133.3.5	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	80	80	85	90	95	100							
<b>SK.7.2133.4</b>	<b>Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik</b>														
IKSK.7.2133.4.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%	5	5	10	15	20	25							
IKSK.7.2133.4.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%	8	14	19	27	20	38							
IKSK.7.2133.4.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%	50	60	70	80	90	100							
<b>2135-Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tuas Teknis Lainnya Pendidikan Islam</b>										13.472.943	-	-	-	-	
<b>SK.7.2135.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)</b>														
IKSK.7.2135.1.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	30	40	55	60	65	70							
IKSK.7.2135.1.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	50	55	60	65	70	75							
<b>SK.7.2135.2</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan</b>														
IKSK.7.2135.2.1	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	80	83	86	89	92	95							
IKSK.7.2135.2.2	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	99	99	99	99	99	100							
<b>SK.7.2135.3</b>	<b>Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi</b>														
IKSK.7.2135.3.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	80	82	84	86	88	90							
<b>SK.7.2135.4</b>	<b>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor</b>														
IKSK.7.2135.4.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	80	82	84	86	88	90							
<b>SK.7.2135.5</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi</b>														
IKSK.7.2135.5.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	%	80	83	86	89	92	95							
<b>SK.7.2135.6</b>	<b>Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan</b>														
IKSK.7.2135.6.1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Orang	13	13	13	13	13	13							
<b>025.08-PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM</b>	<b>DAERAH</b>														
<b>2104-Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah</b>	<b>PURWOREJO</b>									16.262.147	16.668.662	16.668.662	16.668.662	16.668.662	
<b>SK.8.2104.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)</b>														
IKSK.8.2104.1.1	Jumlah KUA yang direvitalisasi	KUA	2	2	2	2	2	2							
IKSK.8.2104.1.2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	KUA	19	19	19	19	19	19							
IKSK.8.2104.1.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Orang	828	328	328	328	328	328							
IKSK.8.2104.1.4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Anak	186	186	186	186	186	186							
IKSK.8.2104.1.5	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina	Orang	38	38	38	38	38	38							
<b>SK.8.2104.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga</b>														
IKSK.8.2104.2.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Keluarga	30	35	40	45	50	60							



<b>2122-Pengelolaan dan Pembinaan Pembedayaan Zakat dan Wakaf</b>										1.526.700	1.247.493	1.247.493	1.247.493	1.247.493
<b>SK.8.2122.1</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pembedayaan dana zakat</b>													
IKSK.8.2122.1.1	Persentase amil yang dibina	%	10	15	25	40	55	70						
IKSK.8.2122.1.2	Persentase lembaga zakat yang dibina	%	100	100	100	100	100	100						
<b>SK.8.2122.2</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan aset wakaf</b>													
IKSK.8.2122.2.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.8.2122.2.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	Akta	30	40	50	60	70	80						
IKSK.8.2122.2.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	78	80	82	84	87	90						
<b>2123-Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam</b>										2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>SK.8.2123.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama</b>													
IKSK.8.2123.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	80	82	84	86	88	90						
IKSK.8.2123.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	%	80	83	85	87	92	96						
IKSK.8.2123.1.3	Jumlah penylar agama yang dibina kompetensi	Orang	60	80	100	120	140	152						
IKSK.8.2123.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	19	40	60	75	80	85						
<b>SK.8.2123.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama</b>													
IKSK.8.2123.2.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.8.2123.2.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Orang	30	30	60	90	120	150						
IKSK.8.2123.2.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Desa	1	1	2	3	4	5						
<b>SK.8.2123.3</b>	<b>Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa</b>													
IKSK.8.2123.3.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Lembaga/O rang	2	2	2	2	2	2						
IKSK.8.2123.3.2	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Lokasi	163	163	163	163	163	163						
<b>SK.8.2123.4</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama</b>													
IKSK.8.2123.4.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	75	76	77	78	79	80						
IKSK.8.2123.4.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Kegiatan	1	1	2	4	6	8						
<b>SK.8.2123.5</b>	<b>Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama</b>													
IKSK.8.2123.5.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		5	100	100	100	100	100						
<b>SK.8.2123.6</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran</b>													
IKSK.8.2123.6.1	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	51	54	60	65	70	75						
IKSK.8.2123.6.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	60	64	68	72	76	80						
IKSK.8.2123.6.3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Orang	16	16	16	16	16	16						
IKSK.8.2123.6.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Lokasi	16	16	16	16	16	16						
<b>SK.8.2123.7</b>	<b>Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik</b>													
IKSK.8.2123.7.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kegiatan/K onten	150	175	200	250	300	350						
<b>SK.8.2123.8</b>	<b>Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat</b>													
IKSK.8.2123.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Lokasi	14	14	14	14	14	14						
<b>SK.8.2123.9</b>	<b>Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama</b>													
IKSK.8.2123.9.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Event	15	0	15	30	60	75						
<b>SK.8.2123.10</b>	<b>Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan</b>													
IKSK.8.2123.0.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Paket	14	30	60	90	120	150						
IKSK.8.2123.0.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Buah	1000	2000	3000	4000	5000	6500						
IKSK.8.2123.0.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	5	10	20	30	40	50						
IKSK.8.2123.0.4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Layanan	50	100	200	300	400	500						
IKSK.8.2123.0.5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Lokasi	20	20	50	75	100	150						
<b>2124-Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah</b>										1.878.298	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
<b>SK.8.2124.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama</b>													
IKSK.8.2124.1.1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	Lokasi	2	2	3	3	4	5						
IKSK.8.2124.1.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Pengelola	0	0	0	25	50	75						
<b>SK.8.2124.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan</b>													
IKSK.8.2124.2.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Paket	14	30	60	90	120	150						
IKSK.8.2124.2.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Buah	1000	2000	3000	4000	5000	6500						
IKSK.8.2124.2.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	5	10	20	30	40	50						
IKSK.8.2124.2.4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Layanan	50	100	200	300	400	500						
IKSK.8.2124.2.5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Lokasi	20	20	50	75	100	150						
<b>2125-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam</b>										0	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>SK.8.2125.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)</b>													
IKSK.8.2125.1.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	30	40	55	60	65	70						
IKSK.8.2125.1.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	50	55	60	65	70	75						

SK.8.2125.2	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan			%	80	83	86	89	92	95					
IKSK.8.2125.2.1	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)			%	99	99	99	99	99	100					
IKSK.8.2125.2.2	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal			%	99	99	99	99	99	100					
SK.8.2125.3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi														
IKSK.8.2125.3.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi			%	80	82	84	86	88	90					
SK.8.2125.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor														
IKSK.8.2125.4.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar			%	80	82	84	86	88	90					
SK.8.2125.5	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi														
IKSK.8.2125.5.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi			%	80	83	86	89	92	95					
025.09-PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	DAERAH														
2137-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen											111.000	84.000	84.000	84.000	84.000
SK.9.2137.1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama														
IKSK.9.2137.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama	Kab. Purworejo	Nilai	85	90	90	90	90	90	90					
IKSK.9.2137.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	Kab. Purworejo	%	100	100	100	100	100	100	100					
IKSK.9.2137.1.3	Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	Kab. Purworejo	Orang	0	0	0	0	0	0	0					
IKSK.9.2137.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	16 Kecamatan	Kelompok	16	16	16	16	16	16	16					
SK.9.2137.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama														
IKSK.9.2137.2.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti		%	100	100	100	100	100	100	100					
IKSK.9.2137.2.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina		Orang	0	0	0	0	0	0	0					
IKSK.9.2137.2.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina		Desa	0	0	0	0	0	0	0					
SK.9.2137.3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa														
IKSK.9.2137.3.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Lembaga/O rang		0	0	0	0	0	0	0					
IKSK.9.2137.3.2	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Lokasi		1	1	1	1	1	1	1					
SK.9.2137.4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama														
IKSK.9.2137.4.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama		%	75	76	77	78	79	80	80					
IKSK.9.2137.4.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1					
SK.9.2137.5	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														
IKSK.9.2137.5.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		5	100	100	100	100	100	100	100					
SK.9.2137.6	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.9.2137.6.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	53	53	53	53	53	53	53					
IKSK.9.2137.6.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	0	0	0	0	0	0	0					
IKSK.9.2137.6.3	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Lokasi		1	1	1	1	1	1	1					
SK.9.2137.7	Meningkatnya kegiatan penyiuran agama di ruang publik														
IKSK.9.2137.7.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kegiatan/K onten		0	0	0	0	0	0	0					
SK.9.2137.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat														
IKSK.9.2137.8.1	Jumlah produk budaya berbasisagama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Lokasi		0	0	0	0	0	0	0					
SK.9.2137.9	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.9.2137.9.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparani dll)	Event		0	0	0	0	0	0	0					
SK.9.2137.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.9.2137.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Paket		0	0	0	0	0	0	0					
IKSK.9.2137.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Buah		0	0	0	0	0	0	0					
IKSK.9.2137.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	0	0	0	0	0	0	0					
2138-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen											9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SK.9.2138.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)														
IKSK.9.2138.1.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	0	0	0	0	0	0	0					
IKSK.9.2138.1.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	0	0	0	0	0	0	0					
SK.9.2138.2	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan														
IKSK.9.2138.2.1	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)		%	85	88	88	88	88	88	89					
IKSK.9.2138.2.2	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal		%	92	95	98	99	99	99	100					
SK.9.2138.3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi														
IKSK.9.2138.3.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi		%	80	82	84	86	88	88	90					
SK.9.2138.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor														

IKSK.9.2138.4.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar		%	85	88	88	88	88	88						
<b>SK.9.2138.5</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi</b>														
IKSK.9.2138.5.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi		%	80	83	85	87	87	89						
<b>025.10-PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK</b>		<b>DAERAH</b>													
<b>2139-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik</b>										90.950	170.600	170.600	170.600	170.600	
<b>SK.10.2139.1</b>	<b>Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama</b>														
IKSK.10.2139.1.1	Persentase siswa di sekolah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2139.1.2	Persentase guru/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2139.1.3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2139.1.4	Persentase guru di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2139.1.5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2139.1.6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2139.1.7	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.10.2139.1.8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama		%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.10.2139.1.9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	0	0	0	0	0	0						
<b>SK.10.2139.2</b>	<b>Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi</b>														
IKSK.10.2139.2.1	Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Sekolah		0	0	0	0	0	0						
<b>SK.10.2139.3</b>	<b>Meningkatnya budaya mutu pendidikan</b>														
IKSK.10.2139.3.1	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2139.3.2	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	0	0	0	0	0	0						
<b>SK.10.2139.4</b>	<b>Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan</b>														
IKSK.10.2139.4.1	Persentase sekolah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2139.4.2	Persentase kepala pendidikan yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2139.4.3	Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak		%	100	100	100	100	100	100						
<b>SK.10.2139.5</b>	<b>Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</b>														
IKSK.10.2139.5.1	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	0	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2139.5.5	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	0	100	100	100	100	100						
<b>SK.10.2139.6</b>	<b>Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik</b>														
IKSK.10.2139.6.1	Persentase Guru yang mengikuti PPG		%	0	50	50	50	50	50						
<b>SK.10.2139.7</b>	<b>Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG</b>		%	0	50	50	50	50	50						
IKSK.10.2139.7.1	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1		%	60	100	100	100	100	100						
<b>SK.10.2139.8</b>	<b>Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal</b>														
IKSK.10.2139.8.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.10.2139.8.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	0	0	0	0	0	0						
<b>SK.10.2139.9</b>	<b>Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan</b>														
IKSK.10.2139.9.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Sekolah		0	0	0	0	0	0						
IKSK.10.2139.9.2	Jumlah gugus pramuka pada Pendidikan keagamaan yang dibina	Gugus		0	0	0	0	0	0						
<b>2140-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik</b>										42.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
<b>SK.10.2140.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama</b>														
IKSK.10.2140.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama	Kab. Purworejo	Nilai	85	90	90	90	90	90						
IKSK.10.2140.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	Kab. Purworejo	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.10.2140.1.3	Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	Kab. Purworejo	Orang	0	0	0	0	0	0						

IKSK.10.2140.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	16 Kecamatan	Kelompok	23	23	23	23	23	23										
SK.10.2140.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama																		
IKSK.10.2140.2.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti		%	100	100	100	100	100	100										
IKSK.10.2140.2.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina		Orang	0	0	0	0	0	0										
IKSK.10.2140.2.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina		Desa	0	0	0	0	0	0										
SK.10.2140.3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama,																		
IKSK.10.2140.3.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi		Lembaga/O rang	0	0	0	0	0	0										
IKSK.10.2140.3.2	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	1	1	1	1	1	1										
SK.10.2140.4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama																		
	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama		%	75	76	77	78	79	80										
IKSK.10.2140.4.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan		Kegiatan	1	1	2	4	6	8										
SK.10.2140.5	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama																		
IKSK.10.2140.5.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		5	100	100	100	100	100	100										
SK.10.2140.6	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran																		
IKSK.10.2140.6.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	23	23	23	23	23	23										
IKSK.10.2140.6.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	0	0	0	0	0	0										
IKSK.10.2140.6.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan		Lokasi	0	0	0	0	0	0										
SK.10.2140.7	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik																		
IKSK.10.2140.7.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Kegiatan/K onten	1	1	1	1	1	1										
SK.10.2140.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat																		
IKSK.10.2140.8.1	Jumlah produk budaya berbasisagama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Lokasi	1	1	1	1	1	1										
SK.10.2140.9	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama																		
IKSK.10.2140.9.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi dll)		Event	0	0	0	0	0	0										
SK.10.2140.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan																		
IKSK.10.2140.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Paket	0	0	0	0	0	0										
IKSK.10.2140.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Buah	0	0	0	0	0	0										
IKSK.10.2140.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	0	0	0	0	0	0										
2141-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik										182.432	189.622	189.622	189.622	189.622	189.622				
SK.10.2141.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)																		
IKSK.10.2141.1.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	92	92	95	99	99	99										
IKSK.10.2141.1.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya																		
SK.10.2141.2	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan		%	95	99	99	99	99	99										
IKSK.10.2141.2.1	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)		%	85	99	99	99	99	99										
IKSK.10.2141.2.2	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal																		
SK.10.2141.3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi		%	99	99	99	99	99	99										
IKSK.10.2141.3.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi		%	99	99	99	99	99	99										
SK.10.2141.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor		%	100	100	100	100	100	100										
IKSK.10.2141.4.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar																		
SK.10.2141.5	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi		%	100	100	100	100	100	100										
IKSK.10.2141.5.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi		%	100	100	100	100	100	100										
5102-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik										397.694	293.570	293.570	293.570	293.570	293.570				
SK.10.5102.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor																		
IKSK.10.5102.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar		%	99	99	99	99	99	99										
SK.10.5102.2	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi																		
IKSK.10.5102.2.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi		%	80	83	86	89	92	95										
SK.10.5102.3	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan																		

[illegible]

[illegible]

<b>025.13-PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA</b>		<b>DAERAH</b>							25						
<b>5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama</b>										23.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
<b>SK.13.5620.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama</b>														
IKSK.13.5620.1.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
IKSK.13.5620.1.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Orang	30	50	65	75	85	150							
IKSK.13.5620.1.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Lokasi	1	2	3	3	4	5							
<b>SK.13.5620.2</b>	<b>Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa</b>														
IKSK.13.5620.2.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Lembaga	30	50	65	75	85	150							
IKSK.13.5620.2.2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1							
<b>SK.13.5620.3</b>	<b>Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)</b>														
IKSK.13.5620.3.1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
<b>SK.13.5620.4</b>	<b>Menguatnya dialog lintas agama dan budaya</b>														
IKSK.13.5620.4.1	Jumlah diaog lintas agama dan budaya	Kegiatan	1	2	2	4	4	5							

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 4 PROGRAM  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA 2020-2024

[illegible]



IKSK.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Lokasi	14	14	14	14	14	14							
<b>SK.12</b>	<b>Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat</b>														Bimas Islam
IKSK.1	Jumlah produk budaya berbasisagama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Lokasi	14	14	14	14	14	14							
<b>SK.13</b>	<b>Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama</b>														Bimas Islam, Bimas Katolik
IKSK.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STO, Ustawa dll)	Event	15	0	15	30	60	75							
<b>SK.14</b>	<b>Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama</b>														Bimas Islam, Bimas Katolik
IKSK.1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	Lokasi	2	2	3	3	4	5							
IKSK.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Pengelola	0	0	0	25	50	75							
<b>SK.15</b>	<b>Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan</b>														Bimas Islam, Bimas Katolik
IKSK.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Paket	14	30	60	90	120	150							
IKSK.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Buah	1000	2000	3000	4000	5000	6500							
IKSK.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	5	10	20	30	40	50							
IKSK.4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Layanan	50	100	200	300	400	500							
IKSK.5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Lokasi	20	20	50	75	100	150							
<b>SK.16</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)</b>														Bimas Islam
IKSK.1	Jumlah KUA yang direvitalisasi	KUA	36	3	3	3	3	3							
IKSK.2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	KUA	36	1	2	1	1	1							
IKSK.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Orang	18137	2972	3972	4973	5973	6973							
IKSK.4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Anak	187	299	411	523	635	750							
IKSK.5	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina	Orang	0	0	0	0	0	0							
<b>SK.17</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga</b>														Bimas Islam, Bimas katolik
IKSK.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhava	Keluarga	70	100	200	400	500	570							
<b>SK.18</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus</b>														PHU
IKSK.1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	0	5	5,50	6	6,6		
<b>SK.19</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji</b>														PHU
IKSK.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	2000		
IKSK.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	5	793	0	0	0	0	71871	30	33	36	39		
<b>SK.20</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji</b>														PHU
IKSK.1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IKSK.2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0		
<b>SK.21</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji</b>														PHU
IKSK.1	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	%	99.87	100	100	100	100	100	66,95	40	60	65	70		
<b>SK.22</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu</b>														PHU
IKSK.1	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	%	100	100	100	100	100	100	30	20	30	35	40		
<b>SK.23</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat</b>														Gara Zawa
IKSK.1	Persentase amil yang dibina	%	0	0	55	70	80	96							
IKSK.2	Persentase lembaga zakat yang dibina	%	75	78	80	85	90	95							
<b>SK.24</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan aset wakaf</b>														Gara Zawa
IKSK.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	Akta	15	20	40	60	70	90							
IKSK.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	90	91	92	93	94	95							
<b>SK.25</b>	<b>Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif</b>														PENMAD, PAKIS, Bimas Katolik
IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.2	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;	%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.3	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Madrasah	1	1	1	1	1	1							
IKSK.5	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan		0	0	0	0	0	0							
<b>SK.26</b>	<b>Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan</b>														PENMAD, PAKIS
IKSK.1	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan	Kegiatan	3	52	54	56	58	60							
IKSK.3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan	Kegiatan	3	9	9	9	9	9							
IKSK.4	Persentase siswa yang mengikuti assesmen	%	0	20	30	40	50	70							

SK.27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran															PENMAD, PAKIS
IKSK.3.1	Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	80	82	84	86	88	90							
IKSK.3.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	25	30	40	50	60	70							
SK.28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan															PENMAD, PAKIS, Bimas Katolik
IKSK.1.1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	60	63	66	69	72	75							
IKSK.1.2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	60	63	66	69	72	75							
IKSK.1.3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	70	73	76	79	82	85							
IKSK.1.4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	70	73	76	79	82	85							
IKSK.1.5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana		%	70	73	76	79	82	85							
IKSK.1.6	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	0	0	0	0	0	0							
IKSK.1.7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	25	30	45	60	65	75							
SK.29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															PENMAD, PAKIS
IKSK.2.1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Siswa		3800	4000	4100	4300	4450	5475							
IKSK.2.2	Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah	%		25	25	27	29	32	35							
IKSK.2.3	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	%		6	6	7	8	9	10							
IKSK.2.4	Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah	%		6	6	10	15	20	27							
SK.30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS															PENMAD, PAKIS
IKSK.2.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	%		5	10	20	30	40	50							
IKSK.2.2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	%		10	20	30	40	50	60							
SK.31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah															PENMAD, PAKIS
IKSK.3.1	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	Siswa		100	150	200	300	400	500							
SK.32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan															PENMAD, PAKIS, Bimas Katolik
IKSK.1.1	Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	%		0	0	0	0	0	0							
IKSK.1.2	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%		75	75	80	82	85	90							
IKSK.1.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%		65	65	70	75	80	90							
IKSK.1.4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	%		0	0	0	0	0	0							
IKSK.1.5	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	%		80	80	85	90	95	100							
SK.33	Terpenuhnya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar															PENMAD, PAKIS
IKSK.2.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%		25	25	27	30	35	37							
IKSK.2.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%		25	25	27	30	35	37							
SK.34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik															PENMAD, PAKIS
IKSK.1.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%		5	5	10	15	20	25							
IKSK.1.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%		8	14	19	27	20	38							
IKSK.1.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%		50	60	70	80	90	100							
IKSK.1.4	Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	%		0	0	0	0	0	0							
SK.35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan															PENMAD, PAKIS
IKSK.1.1	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus															
IKSK.1.2	2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus															
SK.36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi															PENMAD, PAKIS
IKSK.1.1	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Madrasah		17	17	17	17	17	17							
SK.37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan															PENMAD, PAKIS
IKSK.2.1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%		100	100	100	100	100	100							
IKSK.2.2	Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%		1	1	1	1	1	1							
SK.38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan															PENMAD, PAKIS
IKSK.1.1	Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%		100	100	100	100	100	100							

IKSK.1.2	Persentase kepala pendidikan dinyiah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	%	25	25	50	75	90	100							
IKSK.1.3	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	%	75	80	85	90	95	100							
<b>SK.39</b>	<b>Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan</b>														PENMAD, PAKIS, Bimas Katolik
IKSK.2.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Madrasah	11	11	11	11	11	11							
IKSK.2.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	Gugus	11	11	11	11	11	11							
<b>SK.40</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum</b>														TU
IKSK.1.1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	%	75	75	80	85	86	90							
IKSK.1.2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%	80	84	88	92	96	100							
IKSK.1.3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan	10	0	10	10	10	10							
<b>SK.41</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)</b>														TU
IKSK.1.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%	80	82	84	86	88	90							
IKSK.1.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	%	75	76	79	81	83	85							
IKSK.1.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%	80	83	86	89	92	95							
IKSK.1.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	30	40	55	60	65	70							
IKSK.1.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	50	55	60	65	70	75							
IKSK.1.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%	70	73	78	82	86	90							
<b>SK.42</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan</b>														TU
IKSK.1.1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	90	90	95	100	110	115							
IKSK.1.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	80	83	86	89	92	95							
IKSK.1.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	99	99	99	99	99	100							
IKSK.1.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%	80	84	88	92	96	100							
<b>SK.43</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel</b>														TU
IKSK.1.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	80	82	83	84	85	90							
IKSK.1.2	Persentase tanah yang bersertifikat	%	95	96	97	98	99	100							
IKSK.1.3	Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	%	80	80	83	85	90	95							
<b>SK.44</b>	<b>Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi</b>														TU
IKSK.1.1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	70	75	80	84	87	90							
IKSK.1.2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	%	75	75	80	84	87	90							
IKSK.1.3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	75	75	80	84	87	90							
<b>SK.45</b>	<b>Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi</b>														TU
IKSK.1.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	80	82	84	86	88	90							
IKSK.1.2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Satker	1	1	2	2	2	2							
IKSK.1.3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Orang	5	7	10	15	20	25							
<b>SK.46</b>	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran</b>														TU
IKSK.1.1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	%	80	83	86	89	92	95							
IKSK.1.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	60	64	68	72	76	80							
IKSK.1.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	65	67	69	71	73	75							
<b>SK.47</b>	<b>Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran</b>														TU
IKSK.1.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	80	82	84	86	88	90							
IKSK.1.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	70	73	76	79	82	85							
<b>SK.48</b>	<b>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor</b>														TU
IKSK.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	80	82	84	86	88	90							
<b>SK.49</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa</b>														TU
IKSK.1.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	80	82	84	86	88	90							
IKSK.1.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	80	83	86	89	92	95							
IKSK.1.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	85	88	90	91	93	95							
IKSK.1.4	Persentase menurunnya lelang gagal	%	0	0	0	0	0	0							
IKSK.1.5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	%	0	0	0	0	0	0							
<b>SK.50</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga</b>														TU
IKSK.1.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	75	75	80	85	87	90							
<b>SK.51</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi</b>														TU
IKSK.1.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	%	80	83	86	89	92	95							
IKSK.1.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter	%	80	83	86	89	92	95							
<b>SK.52</b>	<b>Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi</b>														TU
IKSK.1.1	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	Sistem	1	1	1	1	1	1							
IKSK.1.2	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	%	75	79	83	85	87	90							

[illegible]

SK.1.2106.2	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan														
IKSK.1.2106.2.1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional		Orang	13	13	13	13	13	13						
2150-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah										0	837.000	837.000	837.000	837.000	
SK.6.2150.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal														
IKSK.6.2150.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	NA	80	81	82	82	84						
SK.6.2150.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi														
IKSK.6.2150.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	NA	85	86	87	88	90						
IKSK.6.2150.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	80	80	85	90	90	95						
SK.6.2150.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja														
IKSK.6.2150.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	70	70	71	72	73	75						
IKSK.6.2150.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	91	92	93	93	94	94						
IKSK.6.2150.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	NA	85	86	87	88	90						
SK.6.2150.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern														
IKSK.6.2150.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	70	75	75	80	80						
IKSK.6.2150.4.2	Persentase data agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	80	80	90	90	90	90						
SK.6.2150.5	Meningkatnya ASN yang profesional														
IKSK.6.2150.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	70	73	75	77	78						
IKSK.6.2150.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	NA	75	77	78	80	82						
2135-Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam										0	22.037.598	22.037.598	22.037.598	22.037.598	
SK.7.2135.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)														
IKSK.7.2135.1.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	30	40	55	60	65	70						
IKSK.7.2135.1.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	50	55	60	65	70	75						
SK.7.2135.2	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan														
IKSK.7.2135.2.1	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)		%	80	83	86	89	92	95						
IKSK.7.2135.2.2	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal		%	99	99	99	99	99	100						
SK.7.2135.3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi														
IKSK.7.2135.3.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi		%	80	82	84	86	88	90						
SK.7.2135.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor														
IKSK.7.2135.4.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar		%	80	82	84	86	88	90						
SK.7.2135.5	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi														
IKSK.7.2135.5.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi		%	80	83	86	89	92	95						
SK.7.2135.6	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan														
IKSK.7.2135.6.1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional		Orang	13	13	13	13	13	13						
2125-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam										12.857.147	13.474.969	13.474.969	13.474.969	13.474.969	
SK.8.2125.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)														
IKSK.8.2125.1.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	30	40	55	60	65	70						
IKSK.8.2125.1.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	50	55	60	65	70	75						
SK.8.2125.2	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan														
IKSK.8.2125.2.1	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)		%	80	83	86	89	92	95						
IKSK.8.2125.2.2	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal		%	99	99	99	99	99	100						
SK.8.2125.3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi														
IKSK.8.2125.3.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi		%	80	82	84	86	88	90						
SK.8.2125.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor														
IKSK.8.2125.4.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar		%	80	82	84	86	88	90						
SK.8.2125.5	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi														
IKSK.8.2125.5.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi		%	80	83	86	89	92	95						
2138-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen										0	138.895	138.895	138.895	138.895	
SK.9.2138.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)														
IKSK.9.2138.1.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.9.2138.1.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	0	0	0	0	0	0						
SK.9.2138.2	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan														

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

IKSK.7.2133.4.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%	8	14	19	27	20	38						
IKSK.7.2133.4.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%	50	60	70	80	90	100						
2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam									740.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
SK.7.2127.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama														
IKSK.7.2127.1.1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	80	80	85	85	90	95						
IKSK.7.2127.1.2	Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	75	75	80	80	80	85						
IKSK.7.2127.1.3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	85	85	100	100	100	100						
IKSK.7.2127.1.4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	90	95	95	95	100	100						
IKSK.7.2127.1.5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	85	85	90	90	95	100						
IKSK.7.2127.1.6	6.Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	80	85	85	90	90	100						
IKSK.7.2127.1.7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	90	90	95	95	100	100						
IKSK.7.2127.1.8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	90	90	100	100	100	100						
IKSK.7.2127.1.9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	90	95	95	100	100	100						
SK.7.2127.2 Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan														
IKSK.7.2127.2.1	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	75	75	80	82	85	90						
IKSK.7.2127.2.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	65	65	70	75	80	90						
IKSK.7.2127.2.3	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	80	80	85	90	95	100						
SK.7.2127.3 Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.7.2127.3.1	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	90	95	100	100	100	100						
IKSK.7.2127.3.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan	Kegiatan	3	52	54	56	58	60						
IKSK.7.2127.3.3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan	Kegiatan	3	9	9	9	9	9						
IKSK.7.2127.3.4	Persentase siswa yang mengikuti assesmen	%	0	20	30	40	50	70						
SK.7.2127.4 Meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik														
IKSK.7.2127.4.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%	5	5	10	15	20	25						
IKSK.7.2127.4.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%	8	14	19	27	20	38						
IKSK.7.2127.4.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%	50	60	70	80	90	100						
025-04 PROGRAM PAUD DAN WAJAH 12 TAHUN		PUSAT-DAERAH												
2128-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam									6.914.727	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
SK.7.2128.1 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi														
IKSK.7.2128.1.1	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Madrasah	17	17	17	17	17	17						
SK.7.2128.2 Meningkatkan budaya mutu pendidikan														
IKSK.7.2128.2.1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2128.2.2	Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	1	1	1	1	1	1						
SK.7.2128.3 Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan														
IKSK.7.2128.3.1	Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2128.3.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	%	25	25	50	75	90	100						
IKSK.7.2128.3.3	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	%	75	80	85	90	95	100						
IKSK.7.2128.4.1 Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam														
IKSK.7.2128.4.2	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.7.2128.4.3	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan AlQur'an	%	100	100	100	100	100	100						
SK.7.2128.5 Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan														
IKSK.7.2128.5.1	Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.7.2128.5.2	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	75	75	80	82	85	90						
IKSK.7.2128.5.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	65	65	70	75	80	90						
IKSK.7.2128.5.4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	%	0	0	0	0	0	0						
IKSK.7.2128.5.5	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	80	80	85	90	95	100						
SK.7.2128.6 Meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik														

IKSK.7.2128.6.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%	5	5	10	15	20	25							
IKSK.7.2128.6.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%	8	14	19	27	20	38							
IKSK.7.2128.6.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%	50	60	70	80	90	100							
<b>SK.5.2128.7</b>	<b>Terpenuhiya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal</b>														
IKSK.7.2128.7.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	25	25	27	30	35	37							
IKSK.7.2128.7.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	25	25	27	30	35	37							
<b>SK.7.2128.8</b>	<b>Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kerneramukaan</b>														
IKSK.7.2128.8.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Madrasah	11	11	11	11	11	11							
IKSK.7.2128.8.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	Gugus	11	11	11	11	11	11							
<b>2129-Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah</b>									0	23.000	23.000	23.000	23.000		
IKSK.7.2129.1.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	NA	50	70	80	90	100							
IKSK.7.2129.1.2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AIQur'an	Kegiatan	2000	3000	7000	8000	9000	10000							
<b>SK.7.2129.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif</b>														
IKSK.7.2129.2.1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	%	89	90	92	93	95	100							
IKSK.7.2129.2.2	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum :														
IKSK.7.2129.2.3	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;														
IKSK.7.2129.2.4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Lokasi	4	6	7	8	9	10							
IKSK.7.2129.2.5	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Lokasi	0	1	1	1	2	3							
<b>SK.7.2129.3</b>	<b>Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan</b>														
IKSK.7.2129.3.1	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	%	80	85	90	95	97	98							
IKSK.7.2129.3.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan	Kegiatan	5	5	9	9	9	12							
IKSK.7.2129.3.3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan	Kegiatan	0	3	3	3	3	3							
IKSK.7.2129.3.4	Persentase siswa yang mengikuti assesmen	%	0	20	30	40	50	70							
<b>SK.7.2129.4</b>	<b>Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran</b>														
IKSK.7.2129.4.1	Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	20	25	30	40	45	50							
IKSK.7.2129.4.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	10	20	25	40	45	50							
<b>SK.7.2129.5</b>	<b>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan</b>														
IKSK.7.2129.5.1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	30	32	35	38	40	42							
IKSK.7.2129.5.2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	40	42	45	46	48	50							
IKSK.7.2129.5.3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	40	42	45	46	48	50							
IKSK.7.2129.5.4	Persentase MA/Ulya/SMTK/MAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	70	73	76	79	82	90							
IKSK.7.2129.5.5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana														
IKSK.7.2129.5.6	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%	0	0	0	0	0	0							
IKSK.7.2129.5.7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana														
<b>SK.7.2129.6</b>	<b>Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat</b>														
IKSK.7.2129.6.1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Siswa	16546	17200	17780	18500	19600	20021							
IKSK.7.2129.6.2	Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah														
IKSK.7.2129.6.3	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	%	18	18	18	18	18	18							
IKSK.7.2129.6.4	Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah														
<b>SK.7.2129.7</b>	<b>Meningkatnya kualitas penanganan ATS</b>														
IKSK.7.2129.7.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	%	0	0	1	1	2	2							
IKSK.7.2129.7.2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren														
<b>SK.7.2129.8</b>	<b>Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah</b>														
IKSK.7.2129.8.1	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Siswa	1951	1978	1989	2005	2115	2200							
<b>SK.7.2129.9</b>	<b>Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi</b>														
IKSK.7.2129.9.1	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Madrasah	22	27	29	31	33	35							
<b>SK.7.2129.10</b>	<b>Meningkatnya budaya mutu pendidikan</b>														
IKSK.7.2129.10.1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	100	100	100	100	100	100							
IKSK.7.2129.10.2	Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	1	5	10	12	14	15							

SK.7.2129.11	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan																
IKSK.7.2129.11.1	Persentase MTs/MA/SMP TK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.7.2129.11.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman																
IKSK.7.2129.11.3	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak		%	100	100	100	100	100	100								
SK.7.2129.12	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan																
IKSK.7.2129.12.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Madrasah	75	75	75	75	76	77									
IKSK.7.2129.12.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	Gugus	75	75	75	75	76	77									
IKSK.7.2129.12.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	Gugus	11	11	11	11	11	11									
2139-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik									0	-	-	-	-	-	-	-	-
SK.10.2139.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama																
IKSK.10.2139.1.1	Persentase siswa di sekolah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.10.2139.1.2	Persentase guru/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.10.2139.1.3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.10.2139.1.4	Persentase guru di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.10.2139.1.5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.10.2139.1.6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.10.2139.1.7	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	0	0	0	0	0	0								
IKSK.10.2139.1.8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama		%	0	0	0	0	0	0								
IKSK.10.2139.1.9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	0	0	0	0	0	0								
SK.10.2139.2	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi																
IKSK.10.2139.2.1	Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Sekolah	0	0	0	0	0	0	0								
SK.10.2139.3	Meningkatnya budaya mutu pendidikan																
IKSK.10.2139.3.1	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu		%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.10.2139.3.2	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	0	0	0	0	0	0								
SK.10.2139.4	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan																
IKSK.10.2139.4.1	Persentase sekolah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.10.2139.4.2	Persentase kepala pendidikan yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman		%	100	100	100	100	100	100								
IKSK.10.2139.4.3	Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak		%	100	100	100	100	100	100								
SK.10.2139.5	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan																
IKSK.10.2139.5.1	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	0	100	100	100	100	100								
IKSK.10.2139.5.5	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	0	100	100	100	100	100								
SK.10.2139.6	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik																
IKSK.10.2139.6.1	Persentase Guru yang mengikuti PPG		%	0	50	50	50	50	50								
SK.10.2139.7	Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG		%	0	50	50	50	50	50								
IKSK.10.2139.7.1	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1		%	60	100	100	100	100	100								
SK.10.2139.8	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal																
IKSK.10.2139.8.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	0	0	0	0	0	0								
IKSK.10.2139.8.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	0	0	0	0	0	0								
SK.10.2139.9	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan																

IKSK.10.2139.9.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Sekolah	0	0	0	0	0	0					
IKSK.10.2139.9.2	Jumlah gugus pramuka pada Pendidikan keagamaan yang dibina		Gugus	0	0	0	0	0	0					





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 309 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020-2024**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2020 melalui video converence / zoom meeting, perlu menunjuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/ Lembaran Negara RI Tahun 2006
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 680 Tanggal 30 Juni 2020);
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020-2024**

- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun adalah menyusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 dan melaporkannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 16 Desember 2020

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PURWOREJO**



**FARID SOLIHIN**

Perancang	Kasubbag TU
Paraf : <i>[Signature]</i>	Paraf : <i>[Signature]</i>

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 369 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020-2024**

Penanggung jawab : Plt. Kepala Kantor Kemenag Kab. Purworejo  
Ketua : Puji Wardi  
Sekretaris : Nuqson Masykur Huda  
Anggota : Siti Qodaryati

**Koordinator Seksi :**

1. Sekretarian Jenderal  
Koordinator Seksi : Arif Asnan  
Anggota : Sugiyanto
2. Bimas Islam  
Koordinator : Uan Abdul Hanan  
Anggota : Waloya
3. Pendidikan Madrasah  
Koordinator : Zamkhoni  
Anggota : Abdi Sandiko
4. Pakis  
Koordinator : Herman Susilo  
Anggota : Zainal Arifin
5. PHU  
Koordinator : Harwal Masyhuda  
Anggota : Azizah Fibriana
6. Gara Zawa  
Kaoordinator : Moh. Basuni  
Anggota : Umi Barokah
7. Katolik / Kristen  
Koordinator : S.Z. Taroreh  
Anggota : Maria Suksma Handayani

